

2025

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD

KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2025



PETAK MINISTRI ALAM HAMBUAN, SE H. KOWARD FAUDAN HADJON, S.H. MCHP
BUPATI PADANG LAWAS WAKIL BUPATI PADANG LAWAS



**BUPATI PADANG LAWAS
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4710);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 Nomor 10);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025, digunakan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas, Plafon Anggaran Sementara Perubahan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025.

2. Ketentuan dalam Pasal 5 di ubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Sistematika Perubahan RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025, adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen

- BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2025**
2.1. Evaluasi Hasil RKPD Triwulan 1 sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah
- BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**
3.1. Kerangka Ekonomi Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025
3.2. Gambaran Keuangan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025
- BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah
- BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**
- BAB VI : PENUTUP**

(2) Uraian secara rinci Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 7 Agustus 2025
BUPATI PADANG LAWAS,


PUTRA MARKOTA ALAM HASIBUAN

Diundangkan di Sibuhuan

pada tanggal 7 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS,


PANGUHUM NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2025 NOMOR 20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025 merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pada pasal 343 ayat (1) bahwa perubahan RKPD dan Renja PD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: (a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah; rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau (b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD ini juga memenuhi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, bahwa pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program asta cita kedalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD tahun anggaran 2025.

RKPD berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang tetap mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA). RENSTRA menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun RENJA tahunan yang selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan anggaran perkegiatan. Selain itu rencana kerja (RENJA) juga menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam perumusan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan tentu saja akan memperhatikan dan menyesuaikan rencana kerja prioritas daerah dalam satu tahun anggaran (RKPD).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan serta konsistensi antara perencanaan dan penganggaran perlu disusun Perubahan RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

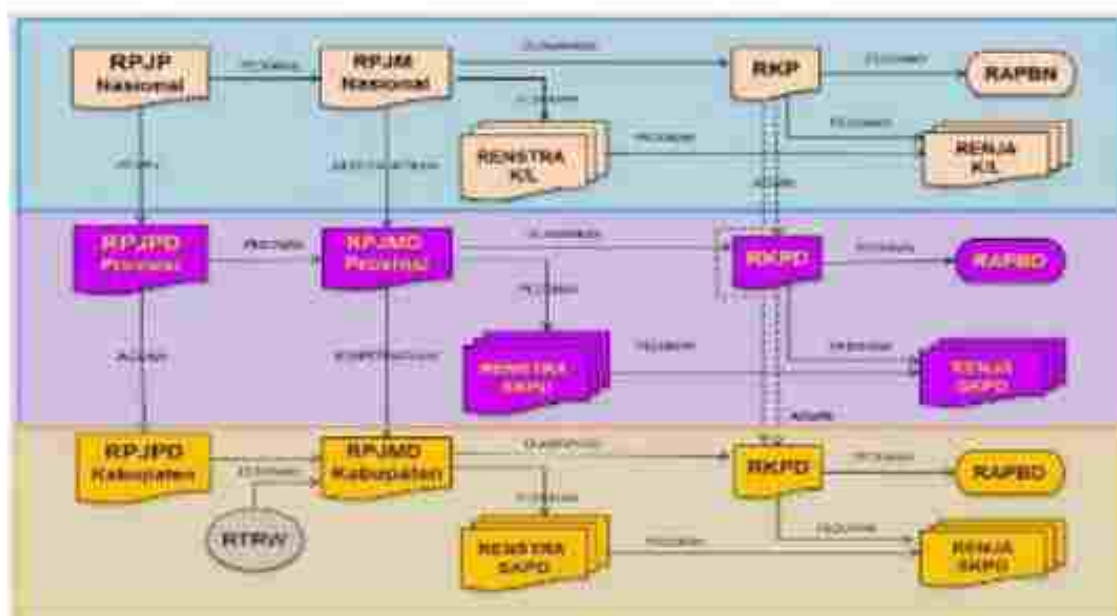
- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- f. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- g. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288 ;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- n. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

- Sumatera Utara Tahun 2025 - 2045; (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02);
 - r. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 Nomor 10).
 - s. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025 Nomor 2)

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025 diperlukan untuk menjamin terjadinya keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025 merupakan acuan pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Tahapan Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025, yang terdiri atas Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang dituangkan secara detail di dalam Perubahan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah, seperti digambarkan pada Gambar 1.1 berikut ini :



Gambar 1.1.
Keterkaitan antar Dokumen Penyusunan RKPD Kabupaten Padang Lawas

Dokumen Perubahan RKPD merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Perubahan RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu satu tahun. Penyusunan Perubahan RKPD harus diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025 adalah merupakan upaya untuk menentukan indikatif besarnya anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada Perubahan Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas sehingga dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi pengalokasian berbagai sumber daya yang tersedia dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025 ebagai berikut :

- Menyediakan arah kebijakan penyelenggaraan pembangunan tahun 2025 disesuaikan dengan perkembangan kondisi pada tahun 2025;
- Menjadi landasan dalam penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

- c) Menyediakan acuan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun 2025.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 disusun sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025 yang mencakup latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen.

Bab II. EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

Bab ini menguraikan evaluasi hasil RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dan permasalahan pembangunan daerah yang mendasari perlunya disusun Perubahan RKPD Tahun 2025.

Bab III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan rancangan ekonomi dan keuangan daerah yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro semester pertama Tahun 2025 dan proyeksi semester kedua Tahun 2025, serta kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan pada Tahun 2025.

Bab IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan sasaran dan prioritas pembangunan daerah, yaitu penjabaran tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah.

Bab V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

Bab VI. PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 bertujuan untuk menilai sejauh mana capaian program dan kegiatan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan, serta mengidentifikasi hambatan, tantangan, dan upaya perbaikannya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di setiap tahunnya. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta adanya umpan balik terhadap kebijakan tersebut. Evaluasi ini menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan anggaran dan perencanaan pembangunan daerah selanjutnya.

Perubahan RKPD Tahun 2025 perlu dilakukan didasarkan pada adanya hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan Tahun 2025 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, dimana:

- 1) Adanya pergeseran kegiatan, sub kegiatan pada Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan dan sub kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan dan sub kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
- 2) Perubahan RKPD Tahun 2025 perlu segera dilaksanakan mengingat dalam pelaksanaan APBD TA. 2025 terdapat beberapa kegiatan yang perlu penyesuaian jumlah, jenis dan perinciannya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya sampai dengan Triwulan I. Program dan Kegiatan yang diusulkan dalam perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan respon atau berbagai masalah yang masih timbul di masyarakat yang perlu mendapatkan penanganan secara cepat;
- 3) Adanya kebijakan Pemerintah yang menjadi Prioritas Nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah serta penambahan program/kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik yang diakomodir melalui proses mendahului Perubahan APBD TA. 2025.

Pada hakekatnya, tujuan dan sasaran digunakan untuk menjabarkan indikasi kinerja pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan sebagaimana terdapat pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Selain itu, dalam peraturan yang sama disebutkan juga bahwa tujuan dan sasaran jangka menengah daerah digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan Perangkat Daerah.

Evaluasi hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan evaluasi atas realisasi kinerja yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah. Kinerja yang dievaluasi berupa kinerja utama, kinerja urusan pemerintahan dan kinerja program perangkat daerah. Pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 menjadi acuan dalam perumusan strategi pembangunan berikutnya untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing.

Tabel 2.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai	Kriteria Penilaian
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Kriteria penilaian realisasi kinerja sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1 dapat dimaknai sebagai berikut:

- a. Sangat Tinggi dan Tinggi
Kriteria ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- b. Sedang
Kriteria ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- c. Rendah dan Sangat Rendah
Pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang ditetapkan.

2.1. Capaian Indikator Makro sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Indikator makro pembangunan merupakan ukuran-ukuran strategis yang mencerminkan kondisi dan capaian pembangunan secara keseluruhan pada suatu daerah. Indikator ini menjadi dasar evaluasi kinerja pembangunan dan acuan dalam penyusunan kebijakan serta perencanaan program ke depan.

Tabel 2.2
Capaian Indikator Makro Kabupaten Padang Lawas
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

NO	INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET RKPD 2025	REALISASI s/d TW I 2025	CAPAIAN TERHADAP TARGET RKPD	SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA
1	IPM	Persen	73,91	73,1*	98,90	Sangat Tinggi
2	Persentase Kemiskinan	Persen	7,01	7,87*	89,07	Tinggi
3	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,05	5,02*	82,97	Tinggi
4	Indeks Gini	Poin	0,224	0,224*	100	Sangat Tinggi
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,6	5,47*	97,68	Sangat Tinggi
6	PDRB Per Kapita (ADHK)	Nilai (Juta Rp)	65,62	65,29*	99,50	Sangat Tinggi

Sumber : BPS Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025
Tanda * merupakan hasil realisasi tahun 2024

Capaian indikator makro Kabupaten Padang Lawas sampai dengan triwulan I secara umum menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan sebagian besar indikator berada pada peringkat kinerja “Sangat Tinggi” meskipun angka dipakai pada realisasi triwulan I merupakan realisasi pada tahun 2024. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 73,10, atau sebesar 98,90% dari target tahun 2025 sebesar 73,91. Capaian ini menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran per kapita. Persentase Penduduk Miskin tercatat sebesar 7,87%, masih berada di atas target yang ditetapkan sebesar 7,01%, dengan tingkat capaian sebesar 89,07%. Meskipun tergolong peringkat kinerja Tinggi, kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang memerlukan intervensi lebih intensif dan terarah. capaian indikator makro pembangunan daerah hingga Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan tren yang positif. Lima dari enam indikator berada pada peringkat Sangat Tinggi, dan satu indikator berada pada peringkat Tinggi. Hal ini

menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah telah berada pada jalur yang tepat. Namun demikian, diperlukan upaya penguatan lebih lanjut, khususnya dalam pengurangan angka kemiskinan dan percepatan pertumbuhan ekonomi, agar target RKPD Tahun 2025 dapat tercapai secara optimal.

2.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran strategis yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan. IKU disusun berdasarkan mandat dan fungsi utama pemerintah daerah, serta menjadi tolok ukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kabupaten Padang Lawas menetapkan 18 (Delapan belas) Indikator Kinerja Utama pada RKPD Tahun 2025. Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Padang Lawas
sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Target RKPD 2025	Target Capaian		
				REALISASI s/d TW I	CAPAIAN	KATEGORI
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	65 (B)	58,54 (CC)*	90,06	Sangat Tinggi
		(Predikat)				
2	Nilai Akuntabilitas Pemerintahan (AKIP)	Nilai	67 (B)	N/A	N/A	N/A
		(Predikat)				
3	Opini BPK	Opini	WTP	WDP	WDP	WDP
4	Indeks Pengelola Keuangan Daerah	Nilai	80	N/A	N/A	N/A
		(Predikat)	(Baik)			
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	95	88,66*	93,33	Sangat Tinggi
6	Indeks SPBE	Nilai	2,42	2,02*	83,47	Tinggi
		(Predikat)	(Baik)			
7	Indeks Pendidikan	Nilai	18,43	16,60	90,07	Tinggi
8	Indeks Kesehatan	Nilai	79,65	N/A	N/A	N/A

No	Indikator	Satuan	Target RKPD 2025	Target Capaian		
				REALISASI s/d TW I	CAPAIAN	KATEGORI
9	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	87,21	N/A	N/A	N/A
10	Kontribusi PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Persen	52,23	53,01*	101,49	Sangat Tinggi
11	Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata	Persen	1,02	0,011	1,08	Sangat Rendah
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	71,34	N/A	N/A	N/A
13	Kondisi Jalan Mantap	Persen	47,64	N/A	N/A	N/A
14	Rasio Rumah Layak Huni	Persen	35,78	28	78,26	Tinggi
15	Rumah Tangga Bersantasi Baik	Persen	78,42	N/A	N/A	N/A
16	Rumah Tangga Dengan Sumber Air Minum Layak	Persen	89,69	N/A	N/A	N/A
17	Indeks Kualitas Udara	Nilai	89	N/A	N/A	N/A
18	Indeks Kualitas Air	Nilai	55	N/A	N/A	N/A

Sumber : Evaluasi RKPD Kabupaten Padang Lawas Triwulan I
Tanda * merupakan hasil realisasi tahun 2024

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sampai dengan triwulan I tahun 2025 indikator kinerja utama belum sepenuhnya tercapai. Beberapa indikator masih memakai data realisasi tahun 2024 dan data yang masih kosong disebabkan data capaiannya diperoleh di akhir tahun 2025

2.3. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah

Capaian kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas sampai dengan triwulan I rata-rata masih dibawah 50 %. Namun terdapat 4 (empat) Perangkat Daerah yang capaian programnya sudah diatas 50 % yaitu

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan Lubuk Barumun, Kecamatan Huristak dan Kecamatan Barumun Barat. Untuk capaian kinerja program terdapat Perangkat Daerah yang capainnya sudah diatas 20 % yaitu Satpol PP dan Pemadam Kebakaran 32,56%, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebesar 32,28%

Tabel 2.4
Rata-rata Capaian Kinerja Program dan Anggaran
Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja	
		Program	Anggaran
1	Pendidikan dan Kebudayaan	2,58	16,00
2	Kesehatan	16,16	8,19
3	RSUD	12,68	10,91
4	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	6,92	2,48
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan	6,85	2,91
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10,36	4,02
7	Satpol PP dan Damkar	32,56	4,40
8	Dinas Sosial	15,19	26,30
9	Dinas Ketenagakerjaan	5,17	1,81
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,34	1,21
11	Dinas Lingkungan Hidup	9,35	6,14
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,50	1,82
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	67,78	10,10
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	3,53	1,65
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	19,06	7,90
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7,86	3,57
17	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	6,79	2,44
18	Dinas Perpustakaan dan Arsip	8,51	6,84
19	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	4,56	2,36

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja	
		Program	Anggaran
20	Dinas Pertanian dan ketahanan pangan	3,37	1,53
21	Sekretariat Daerah	13,92	11,07
22	Sekretariat DPRD	18,12	8,73
23	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7,62	4,19
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	32,28	7,60
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9,58	5,81
26	Inspektorat Daerah	8,46	5,95
27	Kecamatan Aek Nabara Barumun	20,49	3,65
28	Kecamatan Barumun Selatan	6,85	2,88
29	Kecamatan Sihapas Barumun	16,69	5,68
30	Kecamatan Barumun Barat	52,43	28,92
31	Kecamatan Barumun Tengah	6,00	2,84
32	Kecamatan Hutaraja Tinggi	4,79	2,45
33	Kecamatan Sosa Timur	4,87	2,23
34	Kecamatan Sosa Julu	14,02	6,33
35	Kecamatan Ulu Sosa	6,05	2,99
36	Kecamatan Barumun Baru	6,22	3,25
37	Kecamatan Huristak	55,17	47,91
38	Kecamatan Ulu Barumun	6,98	3,39
39	Kecamatan Barumun	15,63	7,88
40	Kecamatan Sosa	5,15	0,39
41	Kecamatan Batang Lubu, Sutam	7,54	3,80
42	Kecamatan Sosopan	4,90	2,49
43	Kecamatan Lubuk Barumun	61,17	19,00
44	Kesatuan Bangsa dan Politik	5,50	2,74
RATA-RATA		14,44	7,15

Sumber : Evaluasi RKPD Kabupaten Padang Lawas Triwulan I

Capaian kinerja merupakan hasil kerja sama seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan, serta bentuk akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran publik. Realisasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan mencerminkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan strategis. Hal ini ditunjukkan melalui realisasi dari indikator kinerja dari setiap aspek kesejahteraan masyarakat, daya saing dan layanan umum serta fokus menurut bidang urusan terhadap capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Realisasi kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada RKPD tahun 2025 sampai dengan triwulan I tahun 2025 adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025						
No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	Tahun 2025			Skala Nilai Peringkat Kinerja
			Target RKPD	REALISASI s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I	
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,05	5,02*	82,96	Tinggi
2	Laju Inflasi	Persen	2,95	2,46*	83,39	Tinggi
3	Indeks Gini	Persen	0,224	0,224*	100	Sangat Tinggi
4	PDRB per Kapita	Rp. (Juta)	65,62	65,29*	99,50	Sangat Tinggi
5	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,01	7,87*	112,27	Sangat Tinggi
6	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	73,91	73,10*	98,90	Sangat Tinggi
7	Indeks Pendidikan	Nilai	18,43	16,60*	90,07	Sangat Tinggi
8	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,67	9,63*	99,59	Sangat Tinggi
9	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,24	13,87*	97,40	Sangat Tinggi
10	Indeks Kesehatan	Nilai	79,65	N/A	N/A	N/A
11	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,77	N/A	N/A	N/A
12	Prevalensi balita stunting	Persen	14	4,1	29,28	Sangat Rendah
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	79,64	77,52*	97,39	Sangat Tinggi
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,6	5,47*	97,68	Sangat Tinggi
15	Kontribusi PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Persen	52,23	53,01*	101,49	Sangat Tinggi
16	Kontribusi PDRB sektor pariwisata	Persen	1,02	0,011	1,08	Sangat Rendah
17	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai (Predikat)	65,00 (B)	58,54*	90,06	Sangat Tinggi
18	Nilai Akuntabilitas Pemerintahan (AKIP)	Nilai (Predikat)	67,00 (B)	N/A	N/A	N/A
19	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai (Predikat)	80	N/A	N/A	N/A
			(Baik)			

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	Tahun 2025			Skala Nilai Peringkat Kinerja
			Target RKPD	REALISASI s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I	
20	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai (Predikat)	95 (Sangat Baik)	88,66*	93,32	Sangat Tinggi
21	Indeks SPBE	Nilai (Predikat)	2,6 (Baik)	2,02* (Cukup)	77,69	Tinggi
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
A	Layanan Urusan Wajib Dasar					
1	Pendidikan					
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	99,7	89,40	89,67	Tinggi
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	88,3	41,09	46,53	Rendah
3	Ruang kelas SD/MI kondisi baik	Persen	98,2	80,70	82,18	Tinggi
4	Ruang kelas SMP/MTs kondisi baik	Persen	70,98	65,00	91,57	Sangat Tinggi
5	Guru SD/MI yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	Persen	91,99	93,00	101,10	Sangat Tinggi
6	Guru SMP/MTs yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	Persen	93,77	81,00	86,38	Tinggi
7	Rasio guru/murid sekolah SD/MI	Nilai	725	724	99,86	Sangat Tinggi
8	Rasio guru/murid sekolah SMP/MTs	Nilai	848	847	99,88	Sangat Tinggi
2	Kesehatan					
1	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1.000 penduduk	Nilai	0,24	0,02	8,33	Sangat Rendah
2	Rasio dokter per 1.000 penduduk	Nilai	0,48	0,06	12,5	Sangat Rendah
3	Prevalensi balita stunting	Persen	14	4,1	29,28	Sangat Rendah
4	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)	Persen	50	44,8	89,6	Tinggi

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	Tahun 2025			Skala Nilai Peringkat Kinerja
			Target RKPD	REALISASI s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I	
5	Bed Occupancy Rate (BOR)	Persen	60	N/A	N/A	N/A
6	Bed Turn Over (BTO)	Kali	40	N/A	N/A	N/A
7	Turn Over Interval (TOI)	Hari	3	N/A	N/A	N/A
8	Average Length Of Stay (ALOS)	Hari	6	N/A	N/A	N/A
9	Indikator SPM yang mencapai target	Persen	89	30	33,71	Sangat Rendah
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	41,52	N/A	N/A	N/A
2	Rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak	Persen	89,69	N/A	N/A	N/A
3	Persentase drainase dalam kondisi baik	Persen	49	N/A	N/A	N/A
4	Persentase bangunan/lingkungan/kawasan yang ditingkatkan/tertata	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	47,64	N/A	N/A	N/A
6	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Persen	82	N/A	N/A	N/A
7	Indeks Infrastruktur	Nilai	50	N/A	N/A	N/A
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
1	Rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak	Persen	89,69	N/A	N/A	N/A
2	Rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	Persen	78,42	N/A	N/A	N/A
3	Rasio rumah layak huni	Persen	35,78	28	78,26	Tinggi
4	Rasio permukiman layak huni	Persen	62,9	62	98,57	Sangat Tinggi
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	Tahun 2025			Skala Nilai Peringkat Kinerja
			Target RKPD	REALISASI s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I	
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Persen	100	20	20	Sangat Rendah
2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	100	40	40	Sangat Rendah
3	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WNK)	Persen	100	40	40	Sangat Rendah
4	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	40	40	Sangat Rendah
6	Sosial					
1	Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesosialan	Persen	74	30	40,54	Sangat Rendah
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandang pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	35	18	51,43	Rendah
3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	60	25	41,67	Sangat Rendah
4	Persentase data keluarga miskin yang menjadi sasaran	Persen	4,21	0,3	7,13	Sangat Rendah
B	Layanan Urusan Wajib Non Dasar					
1	Tenaga Kerja					

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	Tahun 2025			Skala Nilai Peringkat Kinerja
			Target RKPD	REALISASI s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I	
1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	68	N/A	N/A	N/A
2	Besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	Orang	450	20	4,44	Sangat Rendah
3	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Kasus	3	N/A	N/A	N/A
4	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	Kasus	2	N/A	N/A	N/A
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah	Persen	42	41	97,62	Sangat Tinggi
2	Jumlah dokumen profil gender dan anak	Dokumen	1	N/A	N/A	N/A
3	Jumlah lembaga layanan anak yang memiliki standar pelayanan minimal	Lembaga	2	1	50	Sangat Rendah
4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	Persen	100	100*	100	Sangat Tinggi
5	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	87,21	86,97*	99,72	Sangat Tinggi
3.	Pangan					
1	Persentase pelaksanaan bantuan tanaman pekarangan	Persen	100	N/A	N/A	N/A
2	Ketersediaan energi dan protein per kapita	energi : kkal/kap/hr	e : 2.300	e : 2.382*	103,57	Sangat Tinggi
		protein : gr/kap/hr	p : 82,00	p : 64,84*	79,07	Tinggi

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	Tahun 2025			Skala Nilai Peringkat Kinerja
			Target RKPD	REALISASI s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I	
3	Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	88	88,6	100,68	Sangat Tinggi
4	Persentase penanganan daerah rawan pangan	Persen	20	8,3	41,5	Rendah
4	Pertanahan					
5	Lingkungan Hidup					
1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup (RPPLH dan KLHS)	Persen	60	N/A	N/A	N/A
2	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	Nilai	55	N/A	N/A	N/A
3	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara	Nilai	89	N/A	N/A	N/A
4	Pendidikan dan pelatihan masyarakat	Kegiatan	2	1	50	Sangat Rendah
5	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Persen	25	N/A	N/A	N/A
6	Persentase cakupan area pelayanan	Persen	6,54	N/A	N/A	N/A
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Persen	100	98,83	98,83	Sangat Tinggi
2	Rasio bayi berakta kelahiran	Persen	100	92,18	92,18	Sangat Tinggi
3	Rasio pasangan berakta nikah	Persen	100	56,04	56,04	Rendah
4	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang tertangani	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
1	Persentase pelaporan administrasi, perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintahan desa tepat waktu	Persen	100	40	40	Sangat Rendah

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	Tahun 2025			Skala Nilai Peringkat Kinerja
			Target RKPD	REALISASI s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I	
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Persen	5	N/A	N/A	N/A
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Persen	78	10	12,82	Sangat Rendah
4	Persentase posyandu aktif	Persen	38	10	26,32	Sangat Rendah
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	1,36	1,90	139,71	Sangat Tinggi
2	Rasio akseptor KB	Persen	83	82	98,79	Sangat Tinggi
3	Angka pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	Persen	83	81,5	98,19	Sangat Tinggi
4	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Persen	32	35	109,38	Sangat Tinggi
5	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	73	80	109,59	Sangat Tinggi
9	Perhubungan					
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Orang	15,442	15,124	97,94	Sangat Tinggi
2	Rasio Izin Trayek	Persen	1	0,00114	0,114	Sangat Rendah
3	Jumlah Kir Angkutan Umum	Kir	4,05	3,85	95,06	Sangat Tinggi
4	Jumlah Pelabuhan / Terminal	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Persentase Layanan Angkutan Darat	Persen	28,397	25,97	91,45	Sangat Tinggi
6	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Persen	28,397	27,172	95,69	Sangat Tinggi
7	Pemasangan Rambu - Rambu	Unit	100	50	50	Sangat Rendah
8	Rasio Panjang Jalan Perjumlah Kendaraan	Persen	4,23	4,05	95,74	Sangat Tinggi
9	Jumlah Orang / Barang yang terangkut Angkutan Umum	orang	18,350,025	16,944.974	92,34	Sangat Tinggi

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	Tahun 2025			Skala Nilai Peringkat Kinerja
			Target RKPD	REALISASI s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I	
10	Komunikasi dan Informatika					
1	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Persen	50	10	20	Sangat Rendah
2	Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Persen	100	N/A	N/A	N/A
3	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	96	3	3,125	Sangat Rendah
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
1	Persentase koperasi aktif	Persen	3,85	0,1	2,6	Sangat Rendah
2	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	18	29	161,11	Sangat Tinggi
12	Penanaman Modal					
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	35	27	77,14	Tinggi
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. (Juta)	906,23	70,46	7,78	Sangat Rendah
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai (Predikat)	95 (Sangat Baik)	90,39 (Baik sekali)	95,15	Sangat Tinggi
4	Persentase perusahaan/pelaku usaha yang memenuhi komitmen perizinan dan penanaman modal	Persen	62	36,8	59,35	Rendah
13	Kepemudaan dan Olah Raga					

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	Tahun 2025			Skala Nilai Peringkat Kinerja
			Target RKPD	REALISASI s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I	
1	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	Persen	60	N/A	N/A	N/A
2	Cakupan pembinaan olahraga	Cabor	9	N/A	N/A	N/A
3	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	5	N/A	N/A	N/A
14	Statistik					
1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	N/A	N/A	N/A
15	Persandian					
1	Tingkat keamanan aplikasi dan informasi pemerintah daerah	Persen	70	N/A	N/A	N/A
16	Kebudayaan					
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kegiatan	10	10*	100	Sangat Tinggi
2	Benda, situs, dan cagar budaya yang dilestarikan	Unit	26	26*	100	Sangat Tinggi
17	Perpustakaan					
1	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Persen	1	0,076	7,6	Sangat Rendah
18.	Kearsipan					
1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	15	8	53,33	Rendah
C.	Layanan Urusan Pilihan					
1	Pariwisata					
1	Kontribusi PDRB sektor pariwisata	Persen	1,02	0,011	1,08	Sangat Rendah
2	Cakupan kunjungan wisatawan	Persen	80	50	62,5	Rendah
3	Pelatihan tata kelola destinasi wisata	Persen	100	N/A	N/A	N/A
2	Pertanian					

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	Tahun 2025			Skala Nilai Peringkat Kinerja
			Target RKPD	REALISASI s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I	
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRE	Persen	52,23	21	40,21	Sangat Rendah
2	Persentase penyuluh yang meningkat kapasitasnya	Persen	90	37	41,11	Sangat Rendah
3	Persentase ketersediaan data produksi pertanian	Persen	100	40	40	Sangat Rendah
4	Persentase pendataan lahan perkebunan masyarakat	Persen	90	92*	102,2	Sangat Tinggi
3	Energi dan Sumber Daya Mineral					
4	Perdagangan					
1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Persen	19,06	N/A	N/A	N/A
2	Persentase kepesertaan pada promosi dagang melalui pameran dagang	Persen	100	N/A	N/A	N/A
3	Persentase promosi dan pemasaran penggunaan produk dalam negeri	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
4	Persentase pelaksanaan operasi pasar	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
5	Perindustrian					
1	Proporsi jumlah IKM (%)	Persen	100	20	20	Sangat Rendah
6	Perikanan dan Peternakan					
1	Produksi perikanan	Ton	4,096	1,031,47	25,18	Sangat Rendah
2	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	Kelompok	25	9	36	Sangat Rendah
3	Konsumsi ikan (kg/kapita/thn)	kg/kapita/tahun	29,8	29,7	99,66	Sangat Tinggi
4	Ketersediaan populasi ternak	Ekor	230.328	164.227	71,30	Sedang

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	Tahun 2025			Skala Nilai Peringkat Kinerja
			Target RKPD	REALISASI s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I	
5	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	70	70	100	Sangat Tinggi
D	Penunjang Urusan					
1	Perencanaan Pembangunan					
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD/RPJMD/RKPD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	100	N/A	N/A	N/A
3	Konsistensi program RKPD ke dalam APBD	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
2	Keuangan					
1	Penetapan Perda APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2	Persentase penyusunan laporan keuangan tepat waktu	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
3	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	WDP	WDP	WDP
4	Bidang taraiyah yang bersertifikat	Persen	100	35	35	Sangat Rendah
5	Persentase aset yang digunakan	Persen	100	96,22	96,22	Sangat Tinggi
6	Persentase realisasi PAD terhadap Pendapatan	Persen	6	2,4	40	Sangat Rendah
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan					
1	Pencapaian nilai sistem merit (8 aspek)	Nilai	250	N/A	N/A	N/A
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	12	8	66,67	Sedang
4	Penelitian dan Pengembangan					
5	Pengawasan					

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	Tahun 2025			Skala Nilai Peringkat Kinerja
			Target RKPD	REALISASI s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I	
1	Maturitas sistem pengendalian interen pemerintah (SPIP)	Level	3	N/A	N/A	N/A
2	Peningkatan kapabilitas aparat pengawasan interen pemerintah (APIP)	Level	3	N/A	N/A	N/A
3	Persentase pelaksanaan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persen	100	20	20	Sangat Rendah
6	Sekretariat Daerah					
1	Persentase peningkatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
2	Persentase pemenuhan layanan sosial dan keagamaan	Persen	100	25	25	Sangat Rendah
3	Persentase terlaksananya fasilitasi dan koordinasi hukum	Persen	100	12	12	Sangat Rendah
4	Persentase fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan administrasi pembangunan	Persen	100	10	10	Sangat Rendah
5	Persentase pelaksanaan kebijakan perekonomian	Persen	100	10	10	Sangat Rendah
7	Sekretariat Dewan					
1	Persentase tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD	Persen	100	N/A	N/A	N/A
8	Kesatuan Bangsa dan Politik					
1	Persentase LSM aktif	Persen	13	1	7,69	Sangat Rendah
2	Jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan kebangsaan	Jumlah	N/A	N/A	N/A	N/A

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	Tahun 2025			Skala Nilai Peringkat Kinerja
			Target RKPD	REALISASI s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I	
3	Presentase parpol yang berperan aktif dalam kegiatan pendidikan politik	Persen	100	50	50	Sangat Rendah
4	Persentase Ormas/LSM yang berperan aktif terhadap pembangunan daerah	Persen	13	1	7,69	Sangat Rendah
5	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai	100	N/A	N/A	N/A

Sumber : Evaluasi RKPD Kabupaten Padang Lawas Triwulan I

Tanda * merupakan realisasi 2024

Dari tabel diatas, capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 masih banyak yang berstatus sangat rendah dalam pencapaian kinerjanya. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan dari kegiatan tersebut dilaksanakan sebagian besar pada triwulan selanjutnya.

2.4. Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Capaian Indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah telah memenuhi target pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan, sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Pelaporan capaian indikator SPM penting untuk mengevaluasi kinerja pelayanan publik, terutama pada sektor-sektor wajib seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan perlindungan sosial. Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Padang Lawas sampai tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.6
Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi					OPD Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
I	Pendidikan								
A.	Pendidikan Dasar Dan Menengah								
1	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-15 tahun	Jumlah Warga Negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	95,31	95,39	96,44	96,67	98,40	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	Kemampuan Literasi SD/MI	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan asesmen nasional (pada jenis pelayanan dasar: pendidikan dasar)	Nilai	43,84	45,19	46,54	52,47	53,32	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	Kemampuan Numerasi SD/MI	Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional (pada jenis pelayanan dasar: pendidikan dasar)	Nilai	21,03	26,91	32,79	47,54	51,09	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4	Iklim Keamanan SD/MI	Indeks Iklim Keamanan di Satuan Pendidikan	Nilai	67,03	68,40	69,77	70,61	73,92	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5	Iklim Kebinekaan SD/MI	Indeks Iklim Kebinekaan di Satuan Pendidikan	Nilai	53,67	56,19	58,71	66,85	67,20	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6	Iklim Inklusivitas SD/MI	Indeks Iklim Inklusivitas di Satuan Pendidikan	Nilai	48,11	50,83	53,55	56,37	57,41	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7	Kemampuan Literasi SMP/MTs	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan asesmen nasional (pada jenis pelayanan dasar: pendidikan dasar)	Nilai	25,54	28,75	31,96	46,14	57,72	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8	Kemampuan	Rata-rata kemampuan	Nilai	50,72	51,44	52,68	53,22	55,45	DINAS

N O	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	SATUA N	REALISASI					OPD PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
	Numerasi SMP/MTs	numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional (pada jenis pelayanan dasar: pendidikan dasar)							PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9	Iklim Keamanan SMP/MTs	Indeks Iklim Keamanan di Satuan Pendidikan	Nilai	56,53	59,21	61,89	64,61	67,03	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
10	Iklim Kebinekaan SMP/MTs	Indeks Iklim Kebinekaan di Satuan Pendidikan	Nilai	46,88	52,20	57,52	64,16	67,29	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
11	Iklim Inklusivitas SMP/MTs	Indeks Iklim Inklusivitas di Satuan Pendidikan	Nilai	41,12	45,73	50,34	54,95	54,03	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
B Pendidikan Kesetaraan									
1	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 - 18 Kesetaraan	Jumlah warga negara 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	15,26	15,38	15,62	15,76	21,16	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
C Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)									
1	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5-6 tahun	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	57,43	59,76	61,52	63,42	80,01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persen	8,25	8,72	10,84	12,22	15,87	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1 / D4	Pertumbuhan pendidik PAUD dengan S1/D IV	Persen	47,85	48,22	49,64	49,83	50,23	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
II KESEHATAN									
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	54	51,33	51,33	61,1	66,9	DINAS KESEHATAN
2	Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	38,2	44	44	62,6	63,2	DINAS KESEHATAN
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	52,2	51,2	51,2	66,4	63	DINAS KESEHATAN
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	40	46,3	46,3	45	66	DINAS KESEHATAN
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	100	99,03	99,03	98	100	DINAS KESEHATAN
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	85	26,3	6,5	31,1	38	DINAS KESEHATAN
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	33	74	48	48	98	DINAS KESEHATAN

N O	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	SATUA N	REALISASI					OPD PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Orang	6,66	3,6	10,25	75,82	84	DINAS KESEHATAN
9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Orang	24	31,7	30	310	184	DINAS KESEHATAN
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Orang	71,24	79	68,38	100,9	127	DINAS KESEHATAN
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Orang	15,2	24,7	53,34	96,9	69,5	DINAS KESEHATAN
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Orang	20,8	100	100	73,2	88,7	DINAS KESEHATAN
III PEKERJAAN UMUM									
1	Penyediaan kebutuhan air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Orang	15	15,66	20,5	22	25	DINAS PEKERJAAN UMUM
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Orang	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
IV PERUMAHAN RAKYAT									
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Orang	0	0	0	0	0	DINAS PERKIMHUB
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Orang	0	0	0	0	0	DINAS PERKIMHUB
V TRANTIBUMLINMAS									
1	Pelayanan ketenteraman dan Ketertiban umum	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara kabupaten/kota	Orang	100	100	100	100	100	SATPOL PP & DAMKAR
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	20	20	20	20	20	BPSD

N O	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	SATUA N	REALISASI					OPD PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	35	35	35	35	35	BPBD
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	75	75	75	75	75	BPBD
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	SATPOL PP & DAMKAR
VI SOSIAL									
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlintar di luar panti	Jumlah Warga negara penyandang disabilitas terlintar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	0	0	0	29,5	14,2	DINAS SOSIAL
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlintar di luar panti	Jumlah anak terlintar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	40	20	20	60	46	DINAS SOSIAL
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlintar di luar panti	Jumlah Warga negara lanjut usia terlintar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	87	100	100	98	44,5	DINAS SOSIAL
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	13,3	26,6	29,4	46	34	DINAS SOSIAL
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	78,6	77,7	78,9	80,1	80,9	DINAS SOSIAL

Capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 menunjukkan variasi kinerja antar urusan pelayanan dasar yang dikelola oleh perangkat daerah. Secara umum, terdapat beberapa capaian yang menunjukkan hasil positif, namun masih terdapat sejumlah urusan yang memerlukan perhatian dan peningkatan signifikan. Urusan Kesehatan mencatat capaian tinggi, dengan rata-rata capaian indikator mencapai 87,36%, mencerminkan peningkatan layanan terhadap kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, lansia, hingga penderita penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peningkatan cakupan dan

kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan, serta implementasi program promotif dan preventif yang terintegrasi.

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) juga menunjukkan kinerja baik dengan rata-rata capaian indikator sebesar 66%. Ini mencerminkan bahwa masih perlu upaya peningkatan pemerintah dalam pemberian cakupan layanan.

Sementara itu, urusan Pendidikan mencapai rata-rata 58,01%, mencerminkan tantangan utama dalam peningkatan kualitas mutu pendidikan dasar. Meskipun angka partisipasi sekolah anak usia 7–15 tahun sudah mendekati angka ideal, namun capaian indikator mutu seperti kemampuan literasi, numerasi, serta iklim kebinekaan dan inklusivitas di satuan pendidikan masih tergolong sedang hingga rendah. Hal ini menjadi sinyal perlunya peningkatan mutu pembelajaran dan lingkungan belajar yang aman dan inklusif.

Urusan Sosial mencatat capaian sedang, yakni 43,92%, menunjukkan perlunya penguatan intervensi untuk kelompok rentan seperti anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, serta korban bencana, baik dalam bentuk rehabilitasi sosial maupun perlindungan dan jaminan sosial. Capaian sangat rendah ditemukan pada urusan Pekerjaan Umum, dengan rata-rata capaian hanya 12,5%, serta Perumahan Rakyat yang belum menunjukkan capaian sama sekali (0%). Hal ini menjadi perhatian utama, mengingat layanan air minum, sanitasi, dan perumahan layak huni merupakan bagian dari kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi pemerintah daerah.

2.5. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan merupakan segala bentuk hambatan, tantangan, atau ketidaksesuaian yang muncul dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan, yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan secara optimal. Permasalahan ini dapat bersifat struktural, sosial, ekonomi, lingkungan, maupun kelembagaan, dan sering kali saling berkaitan satu sama lain. Permasalahan pembangunan mencerminkan kesenjangan antara kondisi ideal yang ingin dicapai (tujuan pembangunan) dengan kondisi riil yang terjadi di masyarakat.

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Padang Lawas diidentifikasi berdasarkan data dan indikator pembangunan yang tersedia, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya sehingga dari hal tersebut akan dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait

dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.5.1. Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Permasalahan utama urusan pendidikan, yaitu :

- a. Belum optimalnya pelayanan pendidikan secara merata dan berkeadilan.
- b. Belum optimalnya pelayanan akses terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
- c. Belum sepenuhnya akses terhadap pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas.
- d. Belum optimalnya peningkatan kualifikasi dan kapasitas SDM Guru/ Tenaga Pendidik.
- e. Belum terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan.

2. Urusan Kesehatan

Permasalahan utama dalam urusan kesehatan antara lain, yaitu :

- a. Kasus stunting masih tinggi.
- b. Belum optimalnya mutu pelayanan rumah sakit.
- c. Belum optimalnya peningkatan jangkauan masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan utama urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, yaitu :

- a. Kondisi irigasi dengan kualitas baik belum merata di seluruh daerah terutama di sentra produksi pangan daerah.
- b. Kondisi sungai, embung, bendungan yang belum optimal dalam mendukung pelestarian sumberdaya air.
- c. Masih kurangnya cakupan pelayanan dan jangkauan pipanisasi/sarana prasarana air bersih di lingkungan perkotaan dan pedesaan.
- d. Masih terbatasnya layanan pengolahan air limbah fasilitas kesehatan, industri, pemukiman di area perkotaan dan pedesaan.
- e. Masih belum memadainya keberadaan gedung pemerintah

untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

- f. Kondisi kemantapan jalan dan jembatan yang perlu ditingkatkan untuk menjamin konektivitas dalam dan antar wilayah.
- g. Kuantitas dan kualitas jalan penghubung, jalan poros yang masih belum merata untuk mendukung pertumbuhan pembangunan.
- h. Masih dibutuhkannya penyediaan akses baru berupa jalan lingkar yang menghubungkan pusat pertumbuhan pembangunan daerah.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan utama urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, yaitu :

- a. Pendataan rumah belum menggunakan standar ketentuan yang berlaku.
- b. Belum dilaksanakan identifikasi kawasan dan permukiman kumuh secara menyeluruh dan mendalam.
- c. Penentuan kawasan perdesaan dan perkotaan dalam penentuan SK Kumuh.
- d. Dokumen perencanaan sektoral (RPKP, RP2KP, RP3KP, RP2KPKPK, RPLP, MASTERPLAN Kawasan Kumuh dll) belum sesuai dengan ketentuan dan regulasi terbaru.
- e. Penentuan kriteria rumah tidak layak huni belum terpadu antar sektor.

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Permasalahan utama urusan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, yaitu :

- a. Masih kurang optimalnya penegakan Peraturan Daerah yang berlaku.
- b. Kurang memadainya sarana, prasarana serta SDM Satpol PP, Linmas, dan Damkar.
- c. Masih rendahnya pendidikan berpolitik dan wawasan kebangsaan.
- d. Masih terdapatnya konflik yang belum terselesaikan.
- e. Belum optimalnya pelayanan pra bencana, penanganan darurat bencana dan pasca bencana sehingga tingginya risiko bencana.

6. Urusan Sosial

Permasalahan utama urusan sosial, yaitu

- a. Belum terdatanya kelembagaan sosial masyarakat.

- b. Kelembagaan sosial masyarakat belum mengetahui pendaftaran, perizinan.
- c. Besarnya biaya untuk membangun Sarana dan Prasarana Sosial.
- d. Masih minimnya koordinasi lintas sektoral dalam penanganan PMKS
- e. Kurangnya minat kelembagaan sosial masyarakat untuk mengurus legalitas lembaganya
- f. Sarana dan prasarana rehabilitasi sosial yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta maupun pelayanan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat belum terbentuk.
- g. Kualitas dan kuantitas aparatur negara penyelenggara pelayanan sosial masih rendah.
- h. Belum adanya perda tentang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial.
- i. Belum adanya perda tentang penyelenggaraan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- j. Kurangnya pengetahuan dan wawasan PMKS fakir miskin dalam mengembangkan bantuan sarana usaha.
- k. Belum tersedianya tempat pelayanan sosial yang representatif bagi penampungan sementara penanganan PMKS.
- l. Peredaran dan penyalahgunaan NAPZA semakin meningkat.

2.5.2. Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan utama urusan tenaga kerja, yaitu :

- a. Tingginya tingkat pengangguran.
- b. Rendahnya perluasan kesempatan kerja.
- c. Kualitas SDM pencari kerja relatif masih rendah.
- d. Belum kondusifnya kondisi hubungan industrial.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Permasalahan utama urusan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, yaitu :

- a. Kurang optimalnya pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- b. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan.

- c. Masih rendahnya pembangunan berperspektif kebutuhan berbasis gender.

3. Urusan Pangan

Permasalahan utama urusan pangan, yaitu :

- a. Ketersediaan pangan cenderung menurun.
- b. Belum meratanya distribusi pangan.
- c. Belum terjaminnya keamanan pangan.
- d. Belum optimalnya konsumsi pangan lokal.

4. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan utama urusan lingkungan hidup, yaitu :

- a. Cakupan pelayanan sampah belum optimal.
- b. Rendahnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
- c. Peningkatan pencemaran dan kerusakan lingkungan disebabkan aktivitas manusia.

5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan utama urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu belum optimalnya kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan.

6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan utama urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, yaitu belum optimalnya keberdayaan masyarakat dan desa.

7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan utama urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yaitu belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB.

8. Urusan Perhubungan

Permasalahan utama urusan perhubungan, yaitu :

- a. Sarana prasarana perhubungan belum terdata dengan baik.
- b. Belum adanya dokumen rencana induk lalu lintas dan angkutan jalan.
- c. Rendahnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor melakukan pengujian secara berkala.

9. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan utama urusan komunikasi dan informatika, yaitu belum terintegrasi jaringan komunikasi dan informatika.

10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan utama urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah, yaitu :

- a. Kurang berkembangnya koperasi.
- b. Kurang berkembangnya UKM.

11. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan utama urusan penanaman modal, yaitu :

- a. Belum terwujudnya pelaksanaan pelayanan yang prima.
- b. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pengelolaan informasi yang belum berjalan optimal.
- c. Peluang potensi investasi dan promosi daerah masih rendah.

12. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Permasalahan utama urusan kepemudaan dan olahraga, yaitu :

- a. Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam pembangunan.
- b. Belum optimalnya pembinaan atlet dan cabang olah raga berprestasi.

13. Urusan Kebudayaan

Permasalahan utama urusan kebudayaan, yaitu rendahnya apresiasi terhadap budaya daerah.

14. Urusan Perpustakaan

Permasalahan utama urusan perpustakaan, yaitu :

- a. Belum optimalnya sarana prasarana dan SDM perpustakaan.
- b. Rendahnya minat baca masyarakat.

15. Urusan Kearsipan

Permasalahan utama urusan kearsipan, yaitu :

- a. Kurangnya sarana prasarana dan SDM kearsipan.
- b. Belum terselamatkannya arsip statis.

2.5.3. Layanan Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan utama urusan kelautan dan perikanan, yaitu :

- a. Masih rendahnya tingkat produksi perikanan.

- b. Kurangnya sarana dan prasarana untuk pengolahan hasil perikanan.

2. Urusan Pariwisata

Permasalahan utama urusan pariwisata, yaitu :

- a. Belum optimalnya penataan daya tarik wisata;
- b. Belum optimalnya sarana dan prasarana pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.
- c. Belum optimalnya kapasitas sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif.

3. Urusan Pertanian

Permasalahan utama urusan pertanian, yaitu :

- a. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi pertanian.
- b. Belum meratanya kebutuhan sarana prasarana pertanian.
- c. Belum optimalnya pendampingan secara intensif kepada petani.
- d. Belum optimalnya produksi peternakan baik daging, telur, maupun susu, dan produk turunannya untuk meningkatkan pendapatan peternak.
- e. Belum termanfaatkannya kotoran ternak yang siap pakai untuk kebutuhan pertanian.

4. Urusan Perdagangan

Permasalahan utama urusan perdagangan, yaitu kenaikan inflasi yang disebabkan oleh gejolak harga pangan (belum terpenuhinya kualitas, kuantitas, kontinuitas produk).

5. Urusan Perindustrian

Permasalahan utama urusan perindustrian, yaitu belum pulihnya kegiatan di sektor industri dan kontribusinya terhadap PDRB pasca Pandemi Covid-19.

2.5.4. Penunjang Urusan

1. Perencanaan Pembangunan

Permasalahan utama fungsi ini, yaitu :

- a. Data sektoral yang tidak update.
- b. Mekanisme usulan perencanaan daerah yang belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh para mitra pembangunan.

2. Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan utama fungsi ini, yaitu belum berkembangnya penelitian dan pengembangan, serta inovasi daerah.

3. Keuangan

Permasalahan utama fungsi ini, yaitu

- a. Masih belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. Masih rendahnya PAD.
- c. Belum maksimalnya Pelayanan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah.
- d. Belum optimalnya dalam penyusunan/pembuatan Laporan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- e. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengamanan Barang Milik Daerah.

4. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan utama fungsi ini, yaitu belum optimalnya profesionalitas ASN.

5. Pengawasan

Permasalahan utama fungsi ini, yaitu belum optimalnya peningkatan tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel yang berorientasi pada pelayanan publik.

2.5.5. Penunjang Lainnya

1. Sekretariat Daerah

Permasalahan utama fungsi ini, yaitu :

- a. Terbatasnya sarana prasarana kerja untuk mendukung kinerja keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Minimnya informasi hasil pembangunan yang dicapai oleh Pemerintah Daerah.
- c. Kurangnya pemahaman penyusunan SAKIP Perangkat Daerah.
- d. kurangnya pemahaman penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Perangkat Daerah.
- e. Belum optimalnya kualitas koordinasi, sistem pengawasan internal,

- pelaporan kinerja pemerintahan daerah dan tata kelola administrasi Pemerintahan Daerah.
- f. Adanya perkara hukum dan peraturan perundang-undangan yang harus ditindaklanjuti di daerah.
 - g. Belum optimalnya pembangunan Jaring Pengaman Sosial (Keagamaan, Pangan, Kesehatan, Kepemudaan dan Pendidikan) dalam upaya mengurangi angka kemiskinan.
 - h. Masih rendahnya penggunaan Produk Lokal dalam kegiatan belanja pemerintah.
 - i. Belum optimalnya kualitas pengendalian kegiatan pembangunan, pelaporan hasil kinerja pembangunan dan tata kelola administrasi pembangunan.
 - j. Rendahnya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.
 - k. Belum optimalnya pengendalian stabilitas harga komoditas bahan pokok.
 - l. Masih belum optimalnya penegasan batas wilayah, pengenalan dan perekaman toponimi (alam, buatan, dan budaya).

2. Sekretariat DPRD

Permasalahan utama fungsi ini, yaitu penyusunan dan pembentukan peraturan daerah tidak bisa maksimal sesuai target dikarenakan terkendala lama waktu pembahasan yang sangat variatif dan bahan bahan pendukung dari Perangkat Daerah yang bersangkutan masih banyak kekurangan.

2.6. Isu Strategis

Dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan, diperlukan identifikasi terhadap berbagai isu strategis yang menjadi tantangan utama dalam pencapaian tujuan pembangunan. Isu strategis merupakan permasalahan atau tantangan utama yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat serta membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah melalui kebijakan dan program prioritas. Adapun isu strategis Kabupaten Padang Lawas yaitu :

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan modal dalam pembangunan daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan masyarakat. Rata-rata lama sekolah

penduduk Kabupaten Padang Lawas secara umum masih berada pada tingkat SMP kelas 3. Hal ini tentunya menjadi perhatian bagi pemerintah daerah mengingat masih rendahnya rata-rata lama sekolah. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas akan berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan kualitas dan pemerataan guru ke berbagai wilayah, serta peningkatan jaringan infrastruktur menuju sekolah. Dari sisi kesehatan, Kabupaten Padang Lawas masih lebih rendah dibandingkan rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Padang Lawas akan meningkatkan pembangunan fasilitas kesehatan di seluruh kecamatan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, pemerataan dokter dan tenaga kesehatan, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatannya.

2. Pengembangan dan pemanfaatan potensi unggulan serta sumber daya daerah secara berkelanjutan

Kabupaten Padang Lawas memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pertumbuhan ekonominya. Mayoritas aktivitas perekonomian hingga saat ini masih didominasi sektor primer, terutama pertanian. Kabupaten Padang Lawas juga terdapat wilayah yang memiliki potensi pertambangan. Kabupaten Padang Lawas harus memanfaatkan kekayaan yang dimilikinya melalui hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produk yang bernilai tambah hingga pada akhirnya diharapkan dapat bersaing di pasar ekspor. Di samping itu, Kabupaten Padang Lawas juga memiliki potensi pada Sektor Pariwisata, di mana terdapat sebanyak 20 destinasi wisata. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perlu memperhatikan hal ini mengingat sektor pariwisata merupakan sektor pertumbuhan ekonomi baru yang dapat berperan sebagai katalis bagi peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas akan berupaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi wisatanya.

3. Peningkatan kualitas Infrastruktur yang resilien terhadap bencana

Infrastruktur merupakan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah untuk kepentingan publik. Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas penting untuk memperlancar aktivitas masyarakat dan perekonomian. Kabupaten Padang Lawas masih menghadapi sejumlah isu yang perlu diperhatikan, seperti rendahnya kualitas jalan, jembatan yang rusak, dan saluran irigasi

yang kurang baik. Ketersediaan jalan dan jembatan yang berkualitas penting bagi kelancaran aktivitas masyarakat dan transportasi barang antar daerah. Saluran irigasi yang baik juga berperan penting bagi peningkatan produktivitas pertanian. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas akan meningkatkan kualitas infrastruktur yang melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan saluran irigasi.

4. Pembangunan ramah lingkungan yang berkelanjutan

Isu lingkungan hingga saat ini masih menjadi perhatian dari tingkat global hingga daerah. Lingkungan yang bersih dan aman memberikan kenyamanan bagi masyarakat untuk bertempat tinggal dan menjalankan aktivitasnya. Pembangunan Kabupaten Padang Lawas yang dilakukan akan memperhatikan kondisi lingkungan dan sumber daya alam sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak akan merusak lingkungan. Kabupaten Padang Lawas juga akan berupaya untuk menggali potensi PLT EBT (Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Terbarukan) sebagai sumber listrik masyarakat dan non-domestik. Kabupaten Padang Lawas juga akan berupaya untuk meningkatkan pengelolaan persampahan daerahnya dengan membangun fasilitas pengolahan sampah daerah.

5. Tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas

Tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas harus diwujudkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas akan berupaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahannya melalui pengembangan sistem pemerintahan yang transparan berbasis teknologi dan program-program yang inovatif. Pemerintah juga akan meningkatkan kompetensi ASN dengan pendidikan dan pelatihan sehingga menghasilkan SDM yang profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran pembangunan dirumuskan untuk menjawab isu-isu strategis daerah serta mengarahkan capaian indikator kinerja utama secara terukur dan berkelanjutan. Sementara itu, prioritas pembangunan disusun dengan mempertimbangkan urgensi kebutuhan masyarakat, kesesuaian dengan arah kebijakan nasional dan provinsi, serta keterbatasan sumber daya yang tersedia. Penetapan prioritas pembangunan bertujuan untuk memperkuat efektivitas program dan kegiatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pencapaian pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Sinkronisasi antara sasaran dan prioritas pembangunan dengan dokumen perencanaan lainnya menjadi fondasi utama dalam mengarahkan pembangunan daerah yang terarah dan berkelanjutan.

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) prinsip pendekatan dalam penyusunan dokumen pembangunan yaitu (1) pendekatan perencanaan teknokratik, (2) pendekatan perencanaan politik, (3) pendekatan perencanaan partisipatif, (4) pendekatan perencanaan dari bawah (bottom up) dan (5) pendekatan perencanaan dari atas (top down). Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Padang Lawas dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain (1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2) Urgensitas penanganan isu; dan (3) kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat.

Guna mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkelanjutan. Hasil pengendalian dan evaluasi memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di wilayah Kabupaten Padang Lawas. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dijadikan salah satu masukan bagi pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025, Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025, amanat

Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Dan Dokumen Perencanaan Strategis lainnya.

Lebih lanjut, Perwujudan Sasaran Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025 difokuskan pada Prioritas Pembangunan yang dilaksanakan dalam serangkaian strategi dan arah kebijakan. Upaya penerapan arah kebijakan dilakukan melalui program dan kegiatan perangkat daerah, yang diharapkan dapat memberi kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum, dan daya saing daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

RPJPN Tahun 2025 - 2045 merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan jangka menengah guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tahap awal upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai melalui RPJMN Tahun 2025-2029 yang berfokus pada penguatan fondasi transformasi. Selanjutnya, pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 secara konkret dituangkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah. Perencanaan tahunan dalam RKP Tahun 2025 disusun sebagai fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan antar RPJPN (periode 2005-2025 ke 2025-2045) dan antar RPJMN (periode 2020-2024 ke 2025-2029). Dengan demikian RKP Tahun 2025 berkedudukan sangat strategis, karena memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi.

RKP Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun ke pertama dari RPJMN Tahun 2025-2029 dengan visi besar yang ingin dicapai yaitu "Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045". RPJMN menekankan pada Pertumbuhan Berkelanjutan, Penurunan kemiskinan dan Sumber daya manusia Berkualitas dengan Pencapaian visi yang diwujudkan dengan 8 (delapan) Misi (Asta Cita) yaitu :

- Misi 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)
- Misi 2 Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
- Misi 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan

lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

- Misi 4 Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
- Misi 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- Misi 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
- Misi 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
- Misi 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

Dengan 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Win) yaitu :

- 1) Memberi makan bergizi gratis untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, ibu Menyusui dan Anak Balita.
- 2) Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten.
- 3) Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
- 4) Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
- 5) Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut

- 6) Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara
- 7) Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
- 8) Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

Dengan 17 (tujuh belas) Program Prioritas yaitu:

- 1) Mencapai swasembada pangan, energi, dan air
- 2) Penyempurnaan sistem penerimaan negara
- 3) Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
- 4) Pencegahan dan pemberantasan korupsi
- 5) Pemberantasan kemiskinan 6) Pencegahan dan pemberantasan narkoba
- 7) Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
- 8) Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi
- 9) Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
- 10) Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
- 11) Menjamin pelestarian lingkungan hidup
- 12) Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
- 13) Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/ perkotaan dan rakyat yang membutuhkan
- 14) Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif karakteristik- mandiri lainnya.

- 15) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
- 16) Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah
- 17) Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga

Melalui Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 akan mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2025 -2029 sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan ekonomi menjadi: 5,3 -5,6 (%)
- 2) Tingkat Pengangguran Terbuka: 4,5 – 5,0 (%)
- 3) Tingkat Kemiskinan menjadi 7,0-8,0 (%)
- 4) Tingkat Kemiskinan Ekstrem < 5 %
- 5) Rasio Gini (nilai) menjadi: 0,378-0,382
- 6) Indeks Modal Manusia (IMM) (nilai) menjadi 0,56
- 7) Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) menjadi 38,6%
- 8) Kontribusi PDB Manufaktur meningkat menjadi 20.8%
- 9) Nilai Tukar Nelayan (kumulatif): 104-105
- 10) Nilai Tukar Petani (kumulatif): 113-115
- 11) Indeks kualitas lingkungan hidup meningkat menjadi 76,49

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, serta RPJMN 2025-2029 guna menjamin terjadinya keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025 – 2029 merupakan tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025 – 2029 yaitu tahap "Penetapan Pondasi Transformasi" menuju pencapaian visi RPJPD "Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan". Visi Pembangunan jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan

Provinsi Sumatera Utara, ernaayaan visi ini menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang, berbagai kebijakan pembangunan hingga tahun 2029 difokuskan untuk mewujudkan visi dengan mempertimbangkan kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang terjadi di Sumatera Utara. Adapun visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 yaitu :

“Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul,
Maju dan Berkelanjutan”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Kolaborasi, bermakna Proses kerjasama untuk menelurkan gagasan atau ide dalam rangka menyelesaikan masalah secara bersama menuju visi Bersama;

SUMUT - Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;

Berkah, bermakna Harapan agar pembangunan tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga membawa kebaikan dan kebermanfaatan bagi semua pihak;

Unggul, bermakna Sumatera Utara yang berperan penting dalam tataran nasional dan global, memiliki sumber daya manusia yang tangguh dengan keberagaman budaya yang harmonis, menjadi pusat bioindustri dan pariwisata bertaraf global;

Maju, bermakna Sumatera Utara menjadi Provinsi maju dengan posisi empat besar dalam perekonomian nasional, sejahtera, merata dan berkeadilan sosial, didukung infrastruktur modern dan pelayanan birokrasi kelas dunia berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya lokal. Kemajuan Sumatera Utara terlihat dari lancarnya akses dan konektivitas antar wilayah, terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan publik, berkurangnya kesenjangan antar wilayah dan antar strata pendapatan masyarakat, dan berkembangnya wilayah metropolitan;

Berkelanjutan, bermakna Sumatera Utara yang berkontribusi dalam menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kelestarian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat, dengan tata kelola yang baik.

Adapun sasaran utama pembangunan Sumatera Utara dalam mewujudkan visi Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan dan mendukung Program Prioritas Nasional untuk pencapaian sasaran utama Trisula Pembangunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Sasaran Utama Pembangunan RPJMD Sumatera Utara
Tahun 2025

Indikator Sasaran Pembangunan	Satuan	Baseline 2024	Target 2025
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,03	5,20- 5,60
PDRB Per Kapita	Nilai (Rp. Juta)	73,57	78,4
Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	5,2	5,2
Tingkat Kemiskinan	Persen	7,19	6,69-7,17
Gini Rasio	Poin	0,306	0,303-0,305
Indeks Modal Manusia	Poin	N/A	0,53-0,55
Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	N/A	1
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Persen	73,96	77,2
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,6	5,27-5,56

Selain itu penetapan target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 diarahkan dalam upaya pencapaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026. Hal -hal tersebut menjadi pertimbangan dalam penetapan Tema RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 yaitu: **“Akselerasi Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumatera Utara”** dimana Tema pembangunan tersebut akan menjadi panduan dalam menentukan dan menjabarkan prioritas daerah ke dalam program-program prioritas pembangunan.

Tabel. 4.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	IPM	Poin	73,10 - 73,40
1.1	Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	71,03
1.2	Meningkatnya derajat kesehatan	Indeks Kesehatan	Poin	76,69
1.3	Meningkatnya pembangunan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Poin	91,06
2	Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif	LPE	Persen	5,20-5,40
		Inflasi	Persen	2,75±1%
		Gini Ratio	Poin	0,322
2.1	Menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat	Persentase Kemiskinan	Persen	8,20 - 8,00
2.2	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,60-5,20
2.3	Meningkatnya kesejahteraan petani	NTP	Poin	125,23
2.4	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata	Kontribusi Sub Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Persen	7,25
3	Peningkatan layanan infrastruktur yang berkelanjutan	Indeks Infrastruktur	Poin	0,806
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO2eq	30,16
3.1	Meningkatnya kinerja layanan sistem transportasi	Persentase jalan mantap	Persen	88,06
3.2	Meningkatnya layanan infrastruktur permukiman	Persentase cakupan layanan infrastruktur permukiman	Persen	73,00
3.3	Meningkatnya kinerja ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Poin	57,10
3.4	Penurunan ketimpangan pembangunan wilayah	Indeks WILLIAMSON	Poin	0,3840
3.5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	74,24
3.6	Meningkatnya ketangguhan bencana	Indeks Resiko Bencana	Poin	141,50
4	Peningkatan tata kelola pemerintah yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin Predikat	72,25 (BB)
4.1	Meningkatnya keberlanjutan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK	Opini	WTP
4.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP	Poin Predikat	72,25(BB)
4.3	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik	Poin Predikat	4,20 (A-)
4.4	Meningkatnya inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	Poin Predikat	57,50-60,00 (inovatif)
4.5	Meningkatnya penilaian kualitas pembangunan	Peringkat PPD	Peringkat	12

Sumber : RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026

Sedangkan pemetaan misi terhadap tujuan, sasaran, indikator, satuan serta baseline di tahun 2024 dengan menyandingkan target- target indikator pada Perubahan RKPD Tahun 2025 Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3
Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan
RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET
						PRKPD 2025
Misi 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Inklusif	Indeks Modal Manusia	Poin	N/A	0,53-0,55
			Angka Kematian Ibu	100.000/KL	N/A	146
			Prevalensi Stunting	Persen	22	21-20
			Cakupan Penemuan Kasus	Persen	71,8	90
			Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	Persen	85	90
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	93,61	98,6
			Usia Harapan Hidup	Tahun	73,9	73,73
		2. Meratanya Pendidikan Berkualitas	Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional			
			a. Literasi Membaca	Poin/Skor	N/A	6,06-12,12
			b. Numerasi	Poin/Skor	N/A	0,00-3,03
			Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional			
			a. Literasi Membaca	Poin/Skor	N/A	35,99-38,49
			b. Numerasi	Poin/Skor	N/A	33,70-36,20
			Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan tinggi	Persen	N/A	11,12
			Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah tinggi	Persen	N/A	71,1
			Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,93	10,3 - 10,33
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,49	13,61 - 13,63
	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat		Tingkat Kemiskinan	Persen	7,19	6,96-7,16
		3. Meningkatnya Perlindungan yang Adaptif dan Inklusif	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	N/A	29,27
			Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi	Unit	N/A	14
Misi Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah	2.3. Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan		Kontribusi PRDB Provinsi	Persen	5,2	5,2
			PDRB per Kapita	Rp. Juta	73,57	78,4
		4. Meningkatnya Hilirisasi Produk Unggulan	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Persen	N/A	5,45
			Rasio PDRB Industri	Persen	18,36	19,00-19,50

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET
						PRKPD 2025
		Daerah	Pengolahan			
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	2,21	2,42
			Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	ribu orang	142,71	300-350
			Proporsi Jumlah UMKM	Persen		3,2
			Ekspor Barang dan Jasa	Persen	12,56	16,45-16,54
			Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	N/A	3,63
			Rasio Volume Usaha koperasi terhadap PDRB	Persen	N/A	0,79
			Indeks Inovasi Daerah	Poin/Skor	59,93	57,50-60,01
			Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan komunikasi	Poin/Skor	N/A	6
		5. Meningkatnya Aktivitas Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Persen	N/A	18,42
			Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Poin/Skor	N/A	0,562
			Indeks Ekonomi Hijau	Poin/Skor	N/A	51,12
	4. Ekonomi yang Stabil dan inklusif		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,6	5,27-5,56
			Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,03	5,20- 5,60
			Gini Rasio	Poin	0,306	0,303-0,305
		6. Terciptanya Stabilitas Harga	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	Poin/Skor	N/A	10,1
			Tingkat Inflasi	Persen	2,12	1,8-3,8
		7. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	28,65	29,7
			Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional	Persen	N/A	2,26
			Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap	Persen	72,75	75
			Persentase Desa Mandiri	Persen	3,1	8,44
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	58,54	59,29-61,67
			Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persen	N/A	43
Misi 3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola	5. Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan		Indeks Pelayanan Publik	Poin/Skor	N/A	3,57
			Indeks Reformasi Birokrasi	Poin/Skor	N/A	

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET
						PRKPD 2025
Pemerintahan	Berintegritas	8. Menguatnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin/Skor	N/A	3,45
			Indeks Reformasi Hukum	Poin/Skor	N/A	70
			Indeks integritas Nasional	Poin/Skor	N/A	66,78
			Indeks Demokrasi Indonesia	Poin/Skor	N/A	82,58-85,83
			Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Poin/Skor	N/A	82
			Jumlah Kerja Sama Provinsi	Jumlah Kerjasama	N/A	20
		9. Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	N/A	1,37
			Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	Persen	N/A	28,77
			Aset Dana Pensiun/PDRB	Persen	N/A	0,13
			Nilai Transaksi Saham per Kapita per Provinsi (Rp)	Rp. Miliar	N/A	8.103.064,03
			Total Kredit/PDRB	Persen	N/A	25,7
			Return on Asset (ROA) BUMD	Persen	N/A	1,24
			Inklusi Keuangan		N/A	97,52
	6. Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan yang mendukung pelaksanaan kebijakan dan pembangunan	10. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	Persen	N/A	70
			Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Persen	N/A	60
			Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	N/A	58,5
			Persentase Penurunan Emisi GRK			
Misi 4. Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan	7. Peningkatan Akses terhadap Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan guna Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat		a. Kumulatif	Persen	N/A	10,06
			b. tahunan	Persen	N/A	19,04
		11. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Ramah Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin/Skor	73,96	77,2
			Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	85,73	10
			Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	N/A	16
			Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh	Persen	N/A	33

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET
						PRKPD 2025
			Pengumpulan Sampah			
			Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	73,47	74,36
			Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipa	Persen	N/A	40,95
			Indeks Resiko Bencana	Poin/Skor	139,84	157,53
		12. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	373	5,2
			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Persen	7,54	7,35
			Konsumsi Listrik per Kapita	kWh	N/A	850
			Intensitas Energi Primer	SBM/Rp Miliar	N/A	170,57
			Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Poin/Skor	N/A	71,04
			Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin/Skor	80,88	81,17-81,2
Misi 5. Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh	8. Terwujudnya Ketahanan Sosial dan Budaya	13. Menguatnya Toleransi dan Kerukunan Antarumat Beragama dalam Kehidupan Sosial	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin/Skor	N/A	55,44-55,48
		14. Menguatnya Pelestarian dan	Indeks Ketimpangan Gender	Persen	0,399	0,407

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Padang Lawas

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Padang Lawas tahun 2025-2029 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi ini menjadi pedoman strategis pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, mengarahkan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan. Diharapkan visi ini mampu menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan, isu-isu strategis, serta selaras dengan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Padang Lawas. Visi Kabupaten Padang Lawas tahun 2025-2029 adalah :

“BERSAMA MEWUJUDKAN PADANG LAWAS MAJU”

Makna dari visi **PADANG LAWAS** yang **MAJU** adalah kondisi dimana Pemerintah Daerah dan masyarakatnya mampu menciptakan kehidupan yang sejahtera, damai, dan saling menghormati dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, budaya, serta kearifan lokal. Kata **MAJU** dijabarkan sebagai berikut :

MANDIRI, bermakna masyarakat Padang Lawas yang mampu berdiri di atas kaki sendiri, mengelola sumber daya lokal dengan baik;

AMANAH, bermakna pemerintahan yang jujur, transparan, dan bertanggungjawab, serta menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjalankan tugas sesuai amanat;

JAYA, bermakna menghadirkan kejayaan melalui pembangunan ekonomi yang kuat, pengelolaan potensi daerah yang optimal, dan pertumbuhan Badan Usaha Milik Daerah;

UNGGUL, bermakna menjadi daerah yang unggul dalam kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta infrastruktur yang merata dan berkeadilan.

Pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui 10 (Sepuluh) misi pembangunan daerah yaitu :

1. Peningkatan kualitas mutu pendidikan dan layanan kesehatan

Membangun layanan pendidikan yang inklusif dan dapat diakses masyarakat, kompetensi pendidik yang kuat, proses pembelajaran yang didukung oleh sarana dan prasarana modern, dan manajemen pendidikan yang berorientasi mutu. Membangun layanan kesehatan dengan fasilitas yang terjangkau, penguatan

fasilitas kesehatan tingkat pertama dan lanjutan, perluasan kepesertaan program jaminan kesehatan, penguatan kapasitas tenaga kesehatan, dan integrasi teknologi kesehatan guna mempermudah akses layanan.

2. Pembangunan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Mengembangkan infrastruktur berkelanjutan yang memadukan kebutuhan pembangunan dengan pelestarian lingkungan, berwawasan ekonomi jangka panjang, dan bermanfaat sosial, dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan serta mengutamakan penghematan dan efisiensi energi dalam setiap tahap perencanaannya.

3. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dengan mendorong terwujudnya masyarakat yang religius

Membangun masyarakat yang religius dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, mendorong harmoni antar umat beragama yang dilandasi sikap toleransi dan saling menghargai, serta mengembangkan fungsi rumah ibadah dan lembaga keagamaan sebagai pusat pembinaan spiritual sekaligus wadah pemberdayaan sosial dan pendidikan bagi masyarakat.

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berwibawa

Membangun pemerintahan yang transparansi dan akuntabilitas, mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemerintah, pengembangan sumber daya manusia aparatur yang kompeten, dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

5. Pembangunan sentra ekonomi rakyat melalui pengembangan UMKM

Membangun ekonomi kerakyatan yang berbasis komunitas, memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal, dan beridentitas khas yang mengangkat keunikan daerah sebagai daya tarik dan keunggulan kompetitif.

6. Mengoptimalkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan ramah lingkungan

Memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap mempertahankan fungsi ekologis, memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi mendatang, dan efisiensi sumber daya.

7. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan secara merata dan berkeadilan

Penyediaan akses jalan dan jembatan yang merata di seluruh wilayah, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara adil tanpa diskriminasi

8. Peningkatan produktivitas perkebunan, pertanian, perikanan, dan peternakan

Penyediaan sarana dan prasarana termasuk infrastruktur pendukung irigasi, jalan dan transportasi, serta penataan dan pengembangan kawasan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

9. Menciptakan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan kerja

Meningkatkan kualitas pencari kerja, aksesibilitas dan pemerataan kesempatan kerja melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta penguatan strategi pengurangan kemiskinan ekstrem.

10. Pengembangan destinasi wisata dengan memperhatikan nilai budaya dan kearifan lokal

Mengangkat identitas budaya sebagai daya tarik utama, menjaga kelestarian lingkungan dan budaya, menjaga kelestarian lingkungan dan budaya, dan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi dan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Tujuan memuat hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan

daerah. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Setiap tujuan dan sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang menggambarkan secara langsung tolak ukur keberhasilan pembangunan Kabupaten Padang Lawas dengan tingkatan kinerja paling tinggi yaitu dampak (*impact*).

Penentuan target kinerja tujuan dan sasaran pada dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Padang Lawas mempertimbangkan keselarasan pencapaian target kinerja tujuan perencanaan pembangunan di tingkat Provinsi maupun Nasional, yakni dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan teknis yang terjadi.

Adapun tujuan dan sasaran dari visi, misi Bupati dan wakil bupati terpilih pada dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025 yaitu :

Tabel. 4.4
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Pada Perubahan RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Baseline	Target 2025	
				2024	RKPD	P RKPD
1	Peningkatan Kualitas Mutu Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat					
	1.1	Meningkatnya kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,87	14,24	14,24
			Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	9,63	9,67	9,67
	1.1.1	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Literasi SD (Poin)	0,5682	N/A	60,12
			Literasi SMP (Poin)	0,4935	N/A	52,18
			Numerasi SD (Poin)	0,5342	N/A	57,92
			Numerasi SMP (Poin)	0,496	N/A	52,18
	1.1.2	Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Poin)	22,53	N/A	24,53
	1.1.3	Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional (%)	N/A	N/A	70,00
	1.2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup (Tahun)	71,67	71,77	72,00
	1.2.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	65,94	N/A	70,00
			Angka keberhasilan pengobatan tuberculosi (treatment success rate) (%)	84,12	N/A	88,00
			Angka Kematian Ibu (Per 100.000 KH)	156,53	N/A	122,00
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	N/A	N/A	14,50
2	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Jembatan secara Merata dan Berkeadilan					
	2.1	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan resilien terhadap bencana	Indeks Infrastruktur (Poin)	N/A	50,00	70,00
	2.1.1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (Poin)	N/A	N/A	50,00
	2.1.2	Terwujudnya daerah yang tangguh bencana	Indeks Risiko Bencana (Poin)	153,00	N/A	152,70
	2.1.3	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Rumah Tangga dengan akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	47,66	62,9	74,36
			Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	N/A	N/A	68,00
			Persentase Rumah Tangga dengan Akses	N/A	N/A	4,00

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Baseline	Target 2025	
				2024	RKPD	P RKPD
		2.1.4	Meningkatnya kualitas jembatan Air Minum Aman (%) Persentase Jembatan dalam kondisi baik (%)	59,00	N/A	62,00
		2.1.5	Meningkatnya akses transportasi dari desa ke ibukota kabupaten Rasio konektivitas (%)	19,06	N/A	20,00
3	Membangun Sarana-Prasarana Pemerintahan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan					
	3.1	Tersedianya Sarana-Prasarana Pemerintahan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Indeks Infrastruktur (Poin)	N/A	50,00	70,00
	3.1.1	Meningkatnya pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik (Poin)	4,10	N/A	4,15
4	Meningkatkan Kehidupan Beragama yang Religius dan Harmonis					
	4.1	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang aman dan tertib	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin)	N/A	100	67,30
	4.1.1	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (Poin)	60,17	N/A	60,65
	4.1.2	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Ketimpangan Gender (Poin) Indeks Perlindungan Anak (Poin)	0,813 71,33	N/A N/A	0,800 73,50
	4.1.3	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Poin)	N/A	N/A	80,00
	4.1.4	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang harmoni	Indeks Harmoni Indonesia (Poin)	N/A	N/A	50,00
5	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berwibawa					
	5.1	Terwujudnya tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	58,54	65,00	61,00
	5.1.1	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Pelayanan Publik (Poin) Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	4,10 N/A	N/A 95	4,15 95,47
	5.1.2	Terwujudnya layanan publik berbasis digital	Indeks SPBE (Poin)	2,17	2,60	2,42
	5.1.3	Meningkatnya tata kelola arsip	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah (Poin)	15,00	N/A	35,00
	5.1.4	Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN (Poin)	70,00	N/A	71,00
	5.1.5	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Level)	2,00	N/A	3,00
	5.1.6	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Poin)	N/A	N/A	70,00
	5.1.7	Terwujudnya pengelolaan keuangan	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WDP	N/A	WTP

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Baseline	Target 2025	
				2024	RKPD	P RKPD
		dan aset yang transparan dari akuntabel	(Level)			
			Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	3,88	N/A	4,52
	5.1.8	Meningkatnya peran BUMD	RcA BUMD (%)	N/A	N/A	0,60
6	Membangun Sentra Ekonomi Rakyat dengan Mengembangkan Koperasi dan UMKM					
	6.1	Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,02	6,05	5,35-5,64
	6.1.1	Meningkatnya kontribusi koperasi dan UMKM dalam perekonomian	Kontribusi UMKM terhadap PDRB (%)	N/A	N/A	1,00
			Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	N/A	N/A	1,00
	6.1.2	Meningkatnya daya saing industri	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	16,32092358	N/A	17,53-17,67
	6.1.3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Indeks Desa (%)	0,6217	N/A	64,00
7	Mengoptimalkan Potensi Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan					
	7.1	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya alam	Kontribusi Sektor Penggalian dan Pertambangan (%)	0,44	N/A	0,46
			Kontribusi Sub- Sektor Perkebunan (%)	41,61	N/A	41,19
	7.1.1	Meningkatnya nilai tambah hilirisasi produk Perkebunan dan pertambangan	Nilai Tambah Sektor Penggalian dan Pertambangan (Rp Juta)	80.661,79	N/A	83.081,64
			Nilai Tambah Sub- Sektor Perkebunan (Rp Juta)	7.844.782,76	N/A	7.923.230,59
	7.2	Meningkatnya pembangunan yang ramah lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	67,52	71,34	69,70
	7.2.1	Meningkatnya pengelolaan persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (Poin)	N/A	N/A	19,78
	7.2.2	Menurunnya emisi gas rumah kaca	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton co2 eq)	N/A	N/A	1.000,00
	7.2.3	Terwujudnya ketahanan energi yang ramah lingkungan	Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	N/A	N/A	5,00
8	Meningkatkan Produktivitas Perkebunan, Pertanian, Perikanan, dan Peternakan					
	8.1	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan (Rp juta)	125,73	N/A	140,09
	8.1.1	Meningkatnya kesejahteraan petani	Laju Pertumbuhan PDRB Sub-Sektor Pertanian (%)	6,45	N/A	6,61
			Laju Pertumbuhan PDRB Sub-Sektor	6,06	N/A	6,21

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Baseline	Target 2025	
				2024	RKPD	P RKPD
			Peternakan (%)			
		8.1.2 Meningkatnya kesejahteraan pembudidaya perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub-Sektor Perikanan (%)	5,59	N/A	5,73
		8.1.3 Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan (Poin)	76,75	N/A	77,00
9	Menciptakan Lapangan Kerja dan Pemerataan Kesempatan Kerja					
	9.1	Menurunkan angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,87	4,21	7,79-7,67
	9.1.1	Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Persentase PPKS yang tertangani (%)	60,00	N/A	70,00
	9.2	Meningkatnya lapangan kerja, produktivitas tenaga kerja, dan kewirausahaan	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,47	5,60	5,30
	9.2.1	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp juta/kapita)	129,20	N/A	135,67
	9.2.2	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi (%)	1,47	N/A	5,00
	9.2.3	Meningkatnya minat pemuda untuk berwirausaha	Rasio Kewirausahaan (%)	5,99	N/A	6,08
10	Mengembangkan Destinasi Wisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal					
	10.1	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata daerah	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum (%)	0,90	1,02	1,13
	10.1.1	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Pertumbuhan kunjungan wisatawan (%)	50,00	N/A	11,11
			Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual (%)	N/A	N/A	20,00
	10.1.2	Terwujudnya berkebudayaan maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan (Poin)	51,12	N/A	52,28

Sumber : Rancangan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029

Tabel. 4.5
Penyelarasan Sasaran Utama/Indikator Makro Pembangunan
Kabupaten Padang Lawas, Nasional dan Provinsi Sumatera Utara

No	RPJMN	Tahun 2025	Provinsi Sumatera Utara	Tahun 2025	Kabupaten Padang Lawas	Tahun 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,35-5,64
2	PDRB Per Kapita (Rp juta)	78,4	PDRB per Kapita (Rp juta)	78,4	PDRB per Kapita (Rp juta)	65,62
3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	5,2	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	5,2	Kontribusi PDRB Kab/kota (%)	3,66
4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96 - 7,46	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96 - 7,46	Tingkat Kemiskinan (%)	7,767,67
5	Rasio Gini	0,303-0,305	Rasio Gini	0,303-0,305	Rasio Gini	0,224
6	Indeks Modal Manusia	0,54	Indeks Modal Manusia	0,54	Indeks Pembangunan Manusia	73,70
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1	Penurunan Emisi GRK (ton Co2 eq)	103,858,64
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	69,70
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 - 5,56	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 - 5,56	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,30

Sumber : Bapperida, data diolah

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2025

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029. Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah hingga penyusunan intervensi teknis strategis seperti halnya proyek strategis nasional. Asta Cita sebagai Prioritas Nasional tersebut selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Melalui Visi Misi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 akan mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pendapatan per Kapita menuju setara Negara Maju
 - Pertumbuhan ekonomi: 5,3%

- GNI per kapita sebesar: 5.410 USD
 - Kontribusi PDB Maritim meningkat 8,1%
 - Kontribusi PDB Manufaktur meningkat sebesar 20,8%
2. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional meningkat
Global Power Index meningkat menjadi peringkat 33 dunia
 3. Kemiskinan dan ketimpangan berkurang
 - Tingkat Kemiskinan turun menjadi 7,0-8%
 - Rasio gini turun menjadi 0,378-0,382
 - Kontribusi PDRB KTI meningkat menjadi 21,4%
 4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat
 - Indeks Modal Manusia (IMM) meningkat menjadi 0,56
 5. Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission
 - Penurunan intensitas emisi GRK menjadi 35,53%
 - Indeks kualitas lingkungan hidup meningkat menjadi 76,49 (poin)

Tabel 4.6
Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama
1	PN 1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)
2	PN2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Transformasi Tata Kelola Industri Pertahanan dan Penerapan Skema <i>Spend to Invest</i>
3		Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah
4		Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Sumatera Selatan
5		Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Papua Selatan
6		Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya
7		Pengembangan Pangan Akuatik (<i>Blue Food</i>)
8		Pengembangan Pangan Hewani
9		Pengembangan Pangan lokal dan Nabati
10		Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan
11		Peningkatan Penyediaan Energi
12		Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi
13		Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan
14		Konservasi Sumber Daya Air
15		Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir
16		Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS
17		Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Jawa
18		Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama
19		Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya
20		Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan
21		Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik
22		Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau
23		Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut
24		Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan
25		Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR
26		Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan hasil laut
27	PN3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya
28		Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital
29		Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur Yogyakarta- Prambanan
30		Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Tramen
31		Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba
32		Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo
33		Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim
34		Pengembangan Koperasi Sektor Produksi
35	PN4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini
36		Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas
37		Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak sekolah
38		Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul
39		Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja
40		Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi
41		Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi
42		Penurunan Kematian Ibu dan Anak
43		Pencegahan dan Penurunan Stunting
44		Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
45		Penuntasan TBC
46		Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita
47		Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama
48		Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis
49		Investasi pelayanan kesehatan primer
50		Pembangunan RS lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses
51		Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan
52		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya
53		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi
54		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga
55	PN5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Pengembangan Hilirisasi Nikel
56		Pengembangan Hilirisasi Tembaga
57		Pengembangan Hilirisasi Bauksit
58		Pengembangan Hilirisasi Timah
59		Pengembangan Hilirisasi Kelapa sawit
60		Pengembangan Hilirisasi Kelapa
61		Pengembangan Hilirisasi Rumput laut
62		Pengembangan Industri Kimia
63		Pembangunan Industri Semikonduktor
64		Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil
65		Penguatan Industri logam Dasar, Besi dan Baja
66		Pengembangan Industri Dirgantara
67		Pengembangan KEK Sei Mangkei
68		Pengembangan KIT Batang
69		Pengembangan KI Weda Bay
70	PN6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan
71		Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif
72		Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif
73		Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pemindahan ke Ibu Kota Nusantara
74		Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU
75		Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa
76	PN7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
77		Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN
78		Transformasi Digital layanan Publik Prioritas
79		Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan
80		Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
81	PN8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Penguatan karakter dan Jati Diri Bangsa
82		Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan kawasan Pemajuan Kebudayaan
83		Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut

4.2.2. Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2025

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 merupakan periode awal Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) 2025-2029 dengan **Visi** RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029 “ Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan”. Untuk mewujudkan visi RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, dirumuskan ke dalam 5 (lima) misi sebagai berikut :

- Misi 1 **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**
Membangun Sumber Daya Manusia Sumatera Utara yang sehat, cerdas, berkarakter, berkualitas, berdaya saing berdasarkan ideologi Pancasila melalui penguatan peran pemuda, perempuan, penyandang disabilitas dan pengarusutamaan gender
- Misi 2 **Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah**
Memperkuat stabilitas makro ekonomi daerah dilakukan melalui pengembangan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan lapangan kerja melalui peningkatan iptek, inovasi,
pemanfaatan energi baru terbarukan, penerapan ekonomi hijau dan biru, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan internasional dalam menjadikan Sumatera Utara sebagai pusat bioindustri dan pariwisata bertaraf global
- Misi 3 **Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan**
Membangun tata kelola Pemerintahan yang lebih berkualitas melalui kerjasama pemangku kepentingan dan pelayanan publik yang berintegritas, lincah, dinamis, responsif dan kolaboratif serta menjunjung tinggi supremasi hukum
- Misi 4 **Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan**
Melanjutkan kesinambungan pembangunan pusat dan daerah melalui pengembangan dan penataan Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan dalam mendukung prioritas pembangunan, investasi dan pengembangan potensi daerah untuk mewujudkan peningkatan produktivitas ekonomi, pemerataan pembangunan dan konektivitas antar wilayah
- Misi 5 **Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh**

Meningkatkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi untuk membangun masyarakat yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim, harmonis dengan lingkungan dan alam serta toleransi antar umat beragama dalam rangka menjaga nilai-nilai demokrasi, mendukung pemberantasan narkoba dan menurunkan angka kriminalitas

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Sumatera Utara yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, pemerintah daerah Sumatera Utara menuangkan ke dalam 17 (tujuh belas) prioritas pembangunan yaitu :

1. Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal.
2. Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya dan Berprestasi.
3. Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu.
4. Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran
5. Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah.
6. Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru.
7. Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal
8. Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)
9. Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi
10. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
11. Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat.
12. Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal.
13. Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing.

14. Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana.
15. Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa.
16. Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Susarana yang Harmonis, Toleran dan Rukun.
17. Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025

Program prioritas adalah program utama yang dipilih sebagai fokus utama dalam suatu periode perencanaan untuk mencapai target pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang telah ditetapkan. Program ini diprioritaskan karena memiliki dampak strategis, mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional atau daerah, serta menjawab kebutuhan mendesak masyarakat. Penetapan program prioritas mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, urgensi, serta potensi hasil yang akan dicapai. Tahun 2025 ini Kabupaten Padang Lawas memiliki tema pembangunan ***“Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia”***. Merujuk tema tersebut maka pembangunan Kabupaten Padang Lawas difokuskan pada pelayanan pemerintahan yang prima, pembangunan perekonomian masyarakat dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Padang Lawas sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029, pemerintah daerah Padang Lawas menuangkan ke dalam 14 (Empat belas) prioritas pembangunan yaitu :

- 1) Peningkatan Kualitas Pendidikan
- 2) Peningkatan Kualitas Kesehatan yang Merata
- 3) Peningkatan Kualitas Infrastruktur
- 4) Peningkatan Ketahanan Daerah
- 5) Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Beragama
- 6) Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender
- 7) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah
- 8) Peningkatan Ekonomi Rakyat
- 9) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
- 10) Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan
- 11) Penurunan Kemiskinan

- 12) Peningkatan Kesempatan Kerja
- 13) Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Berbasis Budaya
- 14) Peningkatan Kemandirian Daerah

Kegiatan Strategis Daerah (KSD) adalah kegiatan prioritas yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah, karena berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, serta pencapaian target pembangunan makro dan indikator kinerja utama daerah. Adapun kegiatan Strategis Daerah Kabupaten Padang Lawas dari setiap Program Prioritas yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan

dengan Kegiatan strategis:

- a. Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah SD dan SMP sesuai standar pendidikan nasional;
- b. Pemenuhan distribusi guru dan peningkatan kualitas guru;

2. Peningkatan Kualitas Kesehatan yang Merata

dengan Kegiatan strategis:

- a. Penguatan program UHC;
- b. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan pemenuhan tenaga kesehatan ke setiap Puskesmas;

3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur

dengan Kegiatan strategis:

- a. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan;
- b. Peningkatan akses rumah layak huni melalui bedah rumah;
- c. Peningkatan akses air minum aman;
- d. Peningkatan akses sanitasi aman;
- e. Pembangunan dan peningkatan jalan penghubung (konektivitas) antar Desa dan antar Kecamatan.

4. Peningkatan Ketahanan Daerah

dengan Kegiatan strategis:

- a. Pemetaan desa rawan bencana;
- b. Pembentukan desa tangguh bencana dan budaya sadar bencana bagi masyarakat.

5. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Beragama

- a. Optimalisasi peran FKUB dan para pemuka adat dalam menjaga kerukunan umat.

6. Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender

- a. Penguatan regulasi dan kebijakan perlindungan Perempuan dan anak;
 - b. Edukasi parenting sebelum pernikahan.
- 7. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah**
- a. Peningkatan kualitas SDM ASN untuk penyelenggara pelayanan publik;
 - b. Optimalisasi kinerja sistem dan metode pelayanan publik (SOP yang transparan, pembuatan aplikasi online);
 - c. Peningkatan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- 8. Peningkatan Ekonomi Rakyat**
- a. Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan;
 - b. Pemetaan dan pengembangan produk-produk unggulan Daerah.
 - c. Peningkatan kemandirian desa melalui BUMDes dan Koperasi Merah Putih
- 9. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**
- a. Pengembangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Pengolahan Sampah (Circular Economy);
 - b. Peningkatan layanan persampahan.
- 10. Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan**
- a. Pemberian bantuan bibit unggul dan alat-alat mesin pertanian;
 - b. Pemberian bantuan benih unggul dan pangan bermutu tinggi untuk peternakan dan perikanan;
 - c. Pengawasan dan penertiban penyaluran pupuk bersubsidi dan alat-alat pertanian dan perkebunan;
 - d. Peningkatan kualitas irigasi dan pembangunan jalan tani untuk pertanian. Optimalisasi penyuluh pertanian, perikanan, dan peternak dan perkebunan.
- 11. Penurunan Kemiskinan**
- a. Pemetaan keluarga miskin/rentan menurut desa/kelurahan;
 - b. Pemberian bantuan sosial sesuai dengan kebutuhan keluarga miskin/rentan;
 - c. Peningkatan jaminan sosial kepada keluarga miskin;
- 12. Peningkatan Kesempatan Kerja**
- a. Pelatihan peningkatan kompetensi calon tenaga kerja sesuai kebutuhan DUDI dan calon Wirausaha melalui BLK
- 13. Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Berbasis Budaya**

- a. Peningkatan daya tarik destinasi wisata melalui pengembangan situs dan cagar budaya;
- b. Pagelaran event budaya dengan kalender event.

14. Peningkatan Kemandirian Daerah

- a. Optimalisasi perangkat daerah untuk penerimaan daerah;
- b. Penentuan target pendapatan berdasarkan potensi melalui kajian sumber-sumber potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain yang sah;
- c. Pemanfaatan aset-aset yang belum produktif;
- d. Pendirian dan pengembangan BUMD sebagai sumber PAD

4.3. Target Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Perubahan RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025

4.3.1. Indikator Kinerja Makro Kabupaten Padang Lawas

Indikator makro pembangunan merupakan cerminan kondisi umum sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat yang digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja pembangunan daerah secara menyeluruh. Indikator-indikator seperti laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia (IPM), dan indeks gini memiliki peran strategis dalam menunjukkan sejauh mana pembangunan telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sasaran pembangunan daerah disusun untuk menjawab tantangan yang tercermin dalam indikator makro. Misalnya, untuk menaikkan persentase IPM, maka sasaran pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Target indikator makro pembangunan Kabupaten Padang Lawas yang ingin dicapai dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.7
Perubahan Target Indikator Kinerja Makro Pembangunan
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025

N O	INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET RKPD 2025	TARGET RPJMD	TARGET PRKPD 2025
1	IPM	Persen	73,1	73,91	73,70	73,70
2	Persentase Kemiskinan	Persen	7,87	7,01	7,76-7,67	7,76-7,67
3	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,02	6,05	5,35-5,64	5,35-5,64
4	Indeks Gini	Poin	0,224	0,224	0,224	0,224

5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,47	5,6	5,30	5,30
6	PDRB Per Kapita (ADHK)	Nilai (Juta Rp)	65,29	65,62	65,62	65,62
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Ton Co2eq	n/a	n/a	103.858,64	103.858,64
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	67,52	71,34	69,70	69,70

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator makro yang mengalami perubahan target yaitu indeks pembangunan manusia, Persentase kemiskinan, Pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan Indeks kualitas lingkungan hidup daerah. Dengan mengacu pada indikator makro, pembangunan ekonomi diharapkan tidak hanya untuk mengejar pertumbuhan angka semata, tetapi juga dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Padang Lawas secara merata. Oleh karena itu, indikator makro menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pembangunan benar-benar memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan penduduk Kabupaten Padang Lawas.

4.3.2. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Padang Lawas

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mendukung visi dan misi pembangunan daerah. IKU ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi terhadap program, kegiatan, dan output strategis yang memiliki pengaruh signifikan terhadap capaian kinerja pembangunan daerah secara menyeluruh. Indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Padang Lawas memuat indikator kinerja sasaran RPJMD sebagai tolok ukur penilaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama pemerintah daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah. Indikator kinerja utama Kabupaten Padang Lawas berdasarkan Rancangan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029, disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.8
Perubahan Target Indikator Kinerja Utama Pembangunan
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025

No	Indikator	Baseline	Target 2025		
		2024	RPJMD	RKPD	P RKPD
1	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	73,10	73,70	73,91	73,70
2	Indeks Infrastruktur (Poin)	-	70,00	50,00	70,00
3	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin)	-	67,30	100	67,30
4	Indeks Pelayanan Publik (Poin)	4,10	4,15	-	4,15
5	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,02	5,35-5,64	6,05	5,35-5,64
6	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,87	7,76-7,67	4,21	7,76-7,67
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	67,52	69,70	71,34	69,70
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,47	5,30	5,60	5,30

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029

4.3.3. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Padang Lawas

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian pembangunan daerah dalam berbagai aspek strategis. IKD disusun untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah maupun tahunan. Penetapan indikator kinerja mulai dari IKU pemerintah daerah dan IKU perangkat daerah memberikan gambaran arsitektur kinerja pembangunan jangka menengah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029. Arsitektur kinerja ini dapat juga disebut cascading yang merupakan penjabaran dan penyelarasan indikator kinerja mulai dari tingkat yang paling tinggi (impact) sampai paling rendah (output). Adapun capaian dan target indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Perubahan RKPD Tahun 2025

Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Perubahan RPJPD Tahun 2020				
No	Indikator	Baseline	TARGET RKPD	
		2024	RKPD	P RKPD
1	Aspek Geografi dan Demografi			
1	Indeks Ketahanan Pangan (Poin)	76,75	N/A	77,00
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	5,53	N/A	5,36
3	Konsumsi Listrik Per Kapita (kWh/kapita)	N/A	N/A	530,00
4	Porsi EBT dalam bauran energi (%)	N/A	N/A	5,00
5	Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)	N/A	N/A	0,64

No	Indikator	Baseline	TARGET RKPD	
		2024	RKPD	P RKPD
6	Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (%)	N/A	89,69	4,00
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	67,52	71,34	69,70
8	Penurunan Emisi GRK (Ton Co2Eq)	N/A	N/A	1.000,00
9	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	N/A	78,42	68,00
10	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (Poin)	N/A	N/A	19,78
11	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	15,90	N/A	33,91
12	Indeks Risiko Bencana (Poin)	153,00	N/A	152,70
13	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,96	1,36	1,90
II Aspek Kesejahteraan Masyarakat				
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,02	6,05	5,35-5,64
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,87	4,21	7,79-7,67
3	PDRB Per Kapita (Rp ribu)	65.287,57	65,62	69.986,85
4	Gini Ratio (Poin)	0,2240	0,224	0,2173
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,47	5,60	5,30
6	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	73,10	73,91	73,70
7	Usia Harapan Hidup (Tahun)	71,67	71,77	72,00
8	Prevalensi stunting (%)	N/A	14	14,50
9	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	65,94	N/A	70,00
10	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success-rate) (%)	84,12	N/A	88,00
11	Indeks Pendidikan	16,60	18,43	18,43
12	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	9,63	9,67	9,67
13	Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	13,87	14,24	14,24
14	Literasi SD (Poin)	56,82	N/A	60,12
15	Literasi SMP (Poin)	49,35	N/A	52,18
16	Numerasi SD (Poin)	53,42	N/A	57,92
17	Numerasi SMP (Poin)	49,60	N/A	52,18
18	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Poin)	22,53	N/A	24,53
19	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	83,10	N/A	85,00
20	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	30,34	N/A	23,00
21	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin)	N/A	100	67,30
22	Indeks Pembangunan Kebudayaan (Poin)	51,12	N/A	52,28
23	Indeks Perlindungan Anak (Poin)	71,33	N/A	73,50
24	Indeks Perlindungan Khusus Anak (Poin)	71,33	N/A	73,50
25	Indeks Pembangunan Keluarga (Poin)	60,17	N/A	60,65
26	Indeks Pembangunan Gender (Poin)	87,01	87,21	87,88
27	Indeks Pemberdayaan Gender (Poin)	54,35	N/A	55,00
28	Indeks Ketimpangan Gender (Poin)	0,813	N/A	0,800
29	Indeks Pembangunan Pemuda (Poin)	N/A	N/A	55,00
III Aspek Daya Saing Daerah				

No	Indikator	Baseline	TARGET RKPD	
		2024	RKPD	P RKPD
1	Angka Ketergantungan (Per 100 Penduduk)	54,40	N/A	54,28
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	16,32	N/A	17,53 -17,67
3	Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum (%)	0,90	N/A	1,13
4	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)	0,70	N/A	0,79
5	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (ADHB)	0,015	N/A	0,017
6	Total Kredit/PDRB ADHB (%)	0,065	N/A	0,070
7	Rasio Kewirausahaan (%)	5,99	N/A	6,08
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	77,52	79,64	77,93
9	Indeks Inovasi Daerah (Poin)	20,98	N/A	22,06
10	Indeks Ekonomi Hijau (Poin)	N/A	N/A	51,00
11	Indeks Ekonomi Biru (Poin)	N/A	N/A	30,00
12	Indeks Masyarakat Digital (Poin)	40,18	N/A	53,00
13	Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB (%)	23,96	N/A	23,63
14	Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB (%)	47,66	N/A	48,81
15	Indeks Infrastruktur (Poin)	N/A	50,00	70,00
16	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (Poin)	N/A	N/A	50,00
17	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau (%)	47,66	N/A	74,36
18	Indeks Desa (%)	0,6217	N/A	64,00
19	Persentase Desa Mandiri (%)	0,33	N/A	0,33
20	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,091	N/A	0,106
21	Inflasi [Kota Padang Sidempuan] (%)	2,46	Mengacu Kota Padangsidempuan	
IV Aspek Pelayanan Umum				
A Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif				
1	Indeks Reformasi Hukum (Poin)	97,14	N/A	98,00
2	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	58,54	65,00	61,00
3	Indeks SPBE (Poin)	2,17	2,42	2,42
4	Indeks Pelayanan Publik (Poin)	4,10	N/A	4,15
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	N/A	95,47
6	Indeks Integritas Nasional (Poin)	76,14	N/A	76,77
B Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial				
1	Persentase Penegakan Perda (%)	95,00	N/A	100,00
2	Indeks Ketentraman dan Ketertiban (Poin)	N/A	N/A	80,00
3	Indeks Harmoni Indonesia	N/A	N/A	50,00
C Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan				
1	Indeks Daya Saing Daerah (Poin)	3,06	N/A	3,20

Tabel 4.10
Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada P.RKPD Tahun 2025

No	Indikator	Baseline 2024	TARGET PRKPD 2025
A Pendidikan			

No	Indikator	Baseline	TARGET PRKPD
		2024	2025
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	55,00	60,20
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	104,24	100,00
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	104,36	100,00
4	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	42,00	52,30
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	97,62	98,01
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	85,53	87,79
7	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	11,28	13,28
8	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	N/A	35,49
9	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	97,62	99,70
10	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	85,53	88,30
11	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/ MI/ Paket A	89,40	97,80
12	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/ MTs/ Paket B	86,13	92,50
13	Angka Pendidikan yang Ditamatkan (PAUD)	97,00	97,50
14	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100,00	100,00
15	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	99,00	99,00
16	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	78,01	98,00
17	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,25	0,10
18	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	0,29	0,20
19	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%)	93,00	94,00
20	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (%)	54	72
21	Proporsi Murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)	99	99
22	Rasio guru/murid sekolah SD/MI	724	725
23	Rasio guru/murid sekolah SMP/MTs	847	848
24	Rasio guru/murid per kelas rata-rata SD/MI	73	53
25	Rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP/MTS	85	95
26	Ruang kelas SD/MI kondisi baik (%)	80,70	83,50
27	Ruang kelas SMP/MTs kondisi baik (%)	65,00	68,80
28	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	40,00	50,00
29	Indeks pemerataan guru	30,00	40,00
30	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidikan	80,00	85,00
31	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/Diperbarui	80,00	90,00
32	Persentase pengembangan bahasa dan sastra	70,00	75,00
B Kesehatan			
1	Angka Kematian Neonatal (Per 1.000 KH)	8,27	7,44
2	Angka Kematian Bayi (Per 1.000 KH)	9,17	8,25
3	Angka Kematian Balita (Per 1.000 KH)	9,62	8,66
4	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 KH)	156,53	122,00
5	Balita Gizi Kurang (%)	2,30	2,07

No	Indikator	Baseline	TARGET PRKP
		2024	2025
6	Balita Gizi Buruk (%)	0,60	0,54
7	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	50,00	55,00
8	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	80,00	85,00
9	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	40,00	50,00
10	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	70,00	80,00
C Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik (%)	17,73	18,80
2	Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	59,00	62,00
3	Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik (%)	47,00	50,00
4	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik (%)	43,00	45,00
5	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	N/A	50,00
6	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	N/A	40,00
7	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah	N/A	60,00
8	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	N/A	0,00
9	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	0,00	0,00
10	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	43,00	45,00
11	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	0,00	0,00
12	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	N/A	40,00
13	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	0,00	0,00
14	Tingkat Kemantapan Jalan	41,14	45,00
15	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	0,00	0,00
16	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah	80,00	90,00
D Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
1	Persentase Rumah Layak Huni (%)	67,00	72,00
2	Luasan Kawasan Kumuh (%)	30,33	29,00
3	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	N/A	75,00
4	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	N/A	70,00
5	Persentase Luas Kawasan Kumuh+I38	N/A	50,00
6	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	N/A	40,00
E Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (%)	100	100
2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (%)	100	100
3	Cakupan Pelayanan Kebakaran (%)	80	85,00
4	Tingkat waktu tanggap layanan wilayah	> 15	> 15

No	Indikator	Baseline	TARGET PRKPD
		2024	2025
	manajemen kebakaran (menit)		
5	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	N/A	100,00
6	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	N/A	50,00
7	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	N/A	60,00
8	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	N/A	40,00
9	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	N/A	55,00
10	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	N/A	50,00
11	Persentase Penanganan Pasca Bencana	N/A	80,00
12	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	N/A	70,00
13	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	N/A	50,00
F Sosial			
1	Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	1,00	3,00
2	Persentase PPKS yang Tertangani (%)	60,00	70,00
3	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	N/A	80,00
4	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	N/A	80,00
5	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	N/A	45,00
6	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	N/A	60,00
7	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	N/A	70,00
8	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	N/A	50,00
9	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	N/A	55,00
10	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	N/A	60,00
11	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	N/A	66,00
12	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	N/A	50,00
13	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	N/A	65,00
14	Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	N/A	54,00
15	Indeks Peranan Sosial	N/A	55,00

No	Indikator	Baseline	TARGET PRKPD
		2024	2025
16	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhannya	N/A	57,00
17	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	N/A	43,00
18	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	N/A	44,00
19	Indeks Kebutuhan Dasar	N/A	30,00
20	Indeks Keberdayaan Ekonomi	N/A	35,00
21	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	N/A	50,00
22	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial, dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	N/A	80,00
23	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya	N/A	70,00
24	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	N/A	75,00
G Tenaga Kerja			
1	Rasio Lulusan S-1/S-2/S-3 (%)	9,91	9,92
2	Besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan (%)	0,59	0,60
3	Dokumen Rencana Tenaga Kerja	N/A	1,00
4	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	N/A	50,00
5	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	59,00	77,00
6	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	N/A	20,00
H Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1	TPAK Perempuan (%)	65,86	67,00
2	Kasus KDRT (Kasus)	2	2
3	Status Kabupaten Layak Anak (Kategori)	N/A	Pratama
4	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	N/A	0,70
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	65,86	67,00
6	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	N/A	75,00
7	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	N/A	40,00
8	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan	N/A	50,00
9	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	N/A	66,62
10	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100,00	100,00
11	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	71,33	73,50
I Pangan			
1	Skor Pola Pangan Harapan (Poin)	88,60	89,00
2	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%)	60,00	62,95
3	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	60,00	62,95

No	Indikator	Baseline	TARGET PRKPD
		2024	2025
4	Skor Pola Pangan Harapan	88,60	89,00
5	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	N/A	30,00
6	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	N/A	70,00
J Lingkungan Hidup			
1	Indeks Kualitas Air (Poin)	50,00	55,00
2	Indeks Kualitas Udara (Poin)	91,02	91,30
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Poin)	54,12	55,00
4	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	N/A	80,00
5	Persentase RTH	N/A	45,00
6	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	N/A	0,00
7	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH	N/A	70,00
8	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	N/A	0,00
9	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	N/A	70,00
10	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	N/A	70,00
11	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	N/A	100,00
12	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	N/A	50,00
K Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk (%)	98,83	98,96
2	Rasio bayi berakte kelahiran (%)	92,18	93,20
3	Rasio pasangan berakte nikah (%)	56,04	57,00
4	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	N/A	74,00
5	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	N/A	55,00
6	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	N/A	57,00
7	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	N/A	40,00
L Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1	Desa Mandiri	1	4
2	Desa Maju	10	29
3	Desa Berkembang	213	170
4	Desa Tertinggal	77	81
5	Desa Sangat Tertinggal	2	19
6	Persentase Aparatur Desa dan BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	N/A	60,00
7	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	N/A	55,00
8	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	N/A	50,00
9	Persentase Fasilitasi Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	N/A	45,00
M Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1	Total Fertilty Rate (Anak Per Wanita)	3,02	3,00
2	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Anak Per 1.000 Wanita)	28,50	28,00
3	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	41,10	43,00
4	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	21,30	21,00

No	Indikator	Baseline	TARGET PRKPD
		2024	2025
5	Rasio Akseptor KB (%)	82,00	83,00
6	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	N/A	64,00
N Perhubungan			
1	Rasio Konektivitas (%)	19,06	20,00
2	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (%)	62,00	64,00
O Komunikasi dan Informatika			
1	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	92,00	70,00
2	Persentase rumah tangga dengan akses internet (%)	80,00	80,00
3	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	N/A	60,00
P Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah			
1	Kontribusi UMKM terhadap PDRB (%)	N/A	1,00
2	Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian (%)	N/A	2,00
3	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	N/A	1,00
4	Persentase Koperasi Aktif (%)	26,50	29,46
5	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	N/A	70,00
6	Persentase Koperasi yang Diberikan Pendidikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	N/A	65,00
7	Persentase Koperasi yang Berkualitas	N/A	20,00
8	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	N/A	10,00
9	Pertumbuhan Wirausaha	N/A	15,00
10	Proporsi UKM Menjalani Kemitraan dan Ekspor	N/A	0,50
Q Penanaman Modal			
1	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi (%)	1,47	5,00
2	Realisasi PMDN/PMA (Rp Miliar)	7.582,94	906,23
3	Jumlah Investor PMDN/PMA (Perusahaan)	25,00	25,00
4	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (%)	1,47	-
5	Realisasi Total terhadap Target Investasi	N/A	75,00
6	Persentase Peningkatan Investor	N/A	4,00
7	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	N/A	50,00
8	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha	N/A	80,00
9	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	N/A	85,00
R Kepemudaan dan Olahraga			
1	Persentase Wirausaha Muda (%)	70,00	72,10
2	Persentase atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional (%)	N/A	70,00
3	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	23,00	25
4	Jumlah atlet berprestasi (Orang)	25	25
5	Jumlah prestasi olahraga	12	5
6	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	N/A	40,00
S Statistik			
1	Indeks Pembangunan Statistik (Poin)	1,60	2,00
2	Buku Kabupaten dalam Angka	Ada	Ada
3	Buku PDRB dalam Angka	Ada	Ada
T Persandian			

No	Indikator	Baseline	TARGET PRKPD
		2024	2025
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah (%)	N/A	20,00
U Kebudayaan			
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (Kegiatan)	10	10
2	Benda, situs, dan cagar budaya yang dilestarikan (Objek)	26	26
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (Objek)	20	20
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu (Objek)	26	26
5	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	N/A	50,00
6	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	N/A	70,00
7	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	N/A	75,00
V Perpustakaan			
1	Indeks Minat Baca (Poin)	50,26	51,13
2	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun (Orang)	495	1.030
3	Pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (%)	10,20	4,00
4	Nilai Tingkat Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional	N/A	80,00
W Kearsipan			
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah (Poin)	15,00	35,00
2	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	45,00	17,00
3	Tingkat Ketersediaan Arsip	N/A	67,00
4	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	N/A	55,00
5	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	N/A	20,00
X Pariwisata			
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	2.250	2.500
2	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	50,00	11,11
3	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	N/A	80,00
4	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Hak Kekayaan Intelektual	N/A	5,00
5	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	N/A	20,00
Y Kelautan dan Perikanan			
1	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (%)	0,23	0,22
2	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	4.142,88	4.096,00
3	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	146,79	150,20
4	Terlaksananya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	25,00	25,00
5	Angka Konsumsi Ikan	29,58	29,80
Z Pertanian			
1	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (%)	4,38	4,34

No	Indikator	Baseline	TARGET PRKPD
		2024	2025
2	Kontribusi Sektor Perkebunan terhadap PDRB (%)	41,61	41,19
3	Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB (%)	1,88	1,86
4	Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan (Rp juta/kapita)	125,73	140,09
5	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	N/A	2,00
6	Peningkatan Produksi Hortikultura	N/A	0,90
7	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	N/A	0,58
8	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	N/A	70,00
9	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	N/A	50,00
10	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV	N/A	43,00
11	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	N/A	65,00
12	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	N/A	55,00
13	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	N/A	40,00
AA Perdagangan			
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	6,13	6,15
2	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (%)	66,67	66,67
3	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	N/A	20,00
4	Nilai Ekspor Barang	N/A	1,30
5	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	N/A	100,00
6	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan	50,00	55,00
AB Perindustrian			
1	Proporsi jumlah IKM (%)	90,00	100,00
2	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	N/A	81,00
3	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	N/A	35,00
AC Perencanaan Pembangunan			
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Poin)	N/A	70,00
2	Dokumen RPJPD yang Ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada
3	Dokumen RPJMD yang Ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada	Ada
4	Dokumen RKPD yang Ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada
5	Dokumen RTRW yang Ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada
6	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	N/A	90,00
7	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	N/A	90,00
8	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	N/A	90,00
9	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan	N/A	90,00

No	Indikator	Baseline	TARGET PRKPD
		2024	2025
	Kewilayahan		
10	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	N/A	90,00
AD Keuangan			
1	Opini BPK atas Pelaporan Keuangan (Level)	WDP	WTP
2	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	3,88	4,52
3	RoA BUMD (%)	N/A	0,60
4	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	N/A	10,00
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	N/A	10,00
6	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	N/A	30,00
7	Persentase Penurunan SILPA	N/A	15,00
8	Persentase laporan keuangan tepat waktu	N/A	100,00
9	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	N/A	100,00
10	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	N/A	72,00
11	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	N/A	76,00
AE Kepegawaian, serta Pendidikan dan Pelatihan			
1	Indeks Profesionalitas ASN (Poin)	70,00	71,00
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	8,00	8,00
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	8,00	6,00
4	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	N/A	100,00
5	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	N/A	70,00
6	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	N/A	74,00
7	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	N/A	75,00
8	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	N/A	80,00
9	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	N/A	77,00
10	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	N/A	65,00
11	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	N/A	70,00
AF Penelitian dan Pengembangan			
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan (%)	N/A	30,00
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	N/A	40,00
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	N/A	20,00
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)	N/A	15,00
5	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	N/A	90,00
6	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang	N/A	90,00

No	Indikator	Baseline	TARGET PRKPD
		2024	2025
	Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah		
7	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	N/A	90,00
8	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis, dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan di Daerah	N/A	90,00
9	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	N/A	90,00
10	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	N/A	90,00
11	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	N/A	90,00
12	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis, dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	N/A	90,00
AG Pengawasan			
1	Indeks Persepsi Korupsi	74,00	80
2	Persentase OPD yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP Minimal B (%)	95,00	100
3	Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti	85	85
4	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Level)	2	3
5	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Level)	2	3
6	Tindaklanjuti Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	85,00	85,00
7	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2,00	3,00
8	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2,00	3,00
AH Sekretariat Daerah			
1	Nilai Evaluasi SAKIP (Poin)	CC	B
2	Efektivitas Kerjasama Daerah	N/A	78,00
3	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	N/A	80,00
4	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	N/A	75,00
5	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	N/A	76,50
AI Pemerintahan Umum			
1	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	N/A	40,00
2	Persentase Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	N/A	53,00
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	N/A	44,00
4	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	N/A	90,00
5	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	N/A	100,00

Tabel 4.11

Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan RPJMD Kabupaten Padang Lawas dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara

NO	RPJMN 2025-2029	2025	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	2025	RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029	2025
	Indikator Utama Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan	
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,73	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,73	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	72,00
2	Kesehatan Ibu dan Anak		Kesehatan Ibu dan Anak			
	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	146	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	146	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	122,00
	b) Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	16,4	b) Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	16,4	b) Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	14,50
3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)			
	a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	90	a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	90	a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	91,00
	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	90	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	90	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	90,00
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,6	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,6		N/A
5	Hasil Pembelajaran:		Hasil Pembelajaran:			
	a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	
	- Literasi membaca	6,06-12,12	- Literasi membaca	6,06-12,12	- Literasi membaca	24,29-26,29
	- Numerasi	00,00 - 3,03	- Numerasi	00,00 - 3,03	- Numerasi	15,29-17,29
	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	35,99-38,49	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	35,99-38,49	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	24,29-26,29
	- Literasi membaca	33,70-36,20	- Literasi membaca	33,70-36,20	- Literasi membaca	15,29-17,29
	- Numerasi		- Numerasi		- Numerasi	
	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,3 - 10,33	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,3 - 10,33	b) C) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,67
	d) Harapan Lama Sekolah	13,61 - 13,63	d) Harapan Lama Sekolah	13,61 - 13,63	c) d) Harapan Lama Sekolah	14,24

NO	RPJMN 2025-2029	2025	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	2025	RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029	2025
	Indikator Utama Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan	
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi(%)	11,12	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi(%)	11,12	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi(%)	13,28
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	71,1	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	71,1	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	85,49
8	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96-7,46	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96-7,46	Tingkat Kemiskinan (%)	7,16-7,67
9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	29,27	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	29,27	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan(%)	23,00
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)		Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)			
11	a) Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	19-19,5	a) Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	19-19,5	a) Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	17,53-17,67
	b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,2	b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,2		N/A
12	Pengembangan Pariwisata		Pengembangan Pariwisata			
	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,42	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,42	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,13
	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	300,00-350,00	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	300,00-350,00		N/A
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)*	5,45	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)*	5,45		N/A
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN		Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			
	a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	3,20%	a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	3,20%		N/A
	b. Rasio kewirausahaan daerah (%)	3,63%	b. Rasio kewirausahaan daerah (%)	3,63%		N/A
	c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,79%	c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,79%	c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	1,00
	d. Return on Asset (ROA) BUMD (%)	1,24	d. Return on Asset (ROA) BUMD (%)	1,24		N/A
15	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik			
	a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 - 5,56	a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 - 5,56	a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,30
	b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	43	b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	43		N/A
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,29 - 61,67	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,29 - 61,67		N/A

NO	RPJMN 2025-2029	2025	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	2025	RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029	2025
	Indikator Utama Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan	
17	Tingkat Penguasaan IPTEK		Tingkat Penguasaan IPTEK			
	Disesuaikan dengan karakteristik daerah		Disesuaikan dengan karakteristik daerah			
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			
	a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	51,12	a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	51,12	a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	51,00
	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	18,42	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	18,42		
19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	20,00
20	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	10,1	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	10,1		N/A
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,7	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,7	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	23,63
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,45 - 16,54	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,45 - 16,54		
23	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan		Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan			
	a. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	3,26%	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan	2,26%		N/A
	b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	74,36	b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	74,36	b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	74,36
	c. Persentase Desa Mandiri (%)	8,44%	c. Persentase Desa Mandiri (%)	8,44%	c. Persentase Desa Mandiri (%)	0,33
24	Indeks Materi Hukum Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH)	70	Indeks Materi Hukum Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH)	70	Indeks Materi Hukum Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH)	98,00
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45		
26	Indeks Pelayanan Publik	3,57	Indeks Pelayanan Publik	3,57	Indeks Pelayanan Publik	4,15
27	Indeks Integritas Nasional	66,78	Indeks Integritas Nasional	66,78	Indeks Integritas Nasional	76,77
28	Disesuaikan dengan karakteristik daerah Usulan Proksi:		Disesuaikan dengan karakteristik daerah Usulan Proksi:			
	a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	70	a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	70		N/A
	b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	60	b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	60	b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	70,00
29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	58,5	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	58,5		N/A

NO	RPJMN 2025-2029	2025	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	2025	RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029	2025
	Indikator Utama Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan	
30	Indeks Demokrasi Indonesia	82,58 - 85,83	Indeks Demokrasi Indonesia	82,58 - 85,83	Indeks Demokrasi Indonesia	80,00
31	Rasio Pajak terhadap PDB (%)		Rasio Pajak terhadap PDB (%)			
32	Tingkat Inflasi (%)	1,8-3,8	Tingkat Inflasi (%)	1,8-3,8		N/A
33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			
	a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	28,77	a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	28,77	a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) ⁶	0,017
	b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,13	b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,13		N/A
	c. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	8.103.064,03	c. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	8.103.064,03		N/A
	d. Total Kredit/PDRB (%)	25,7	d. Total Kredit/PDRB (%)	25,7	d. Total Kredit/PDRB (%)	0,070
34	Inklusi Keuangan (%)	97,52	Inklusi Keuangan (%)	97,52		N/A
35	Disesuaikan dengan karakteristik daerah		Disesuaikan dengan karakteristik daerah			
	Usulan Proksi:		Usulan Proksi:			
	Jumlah Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten/ Kota Kembar/ Bersaudara (Sister Province/ Sister City)		Jumlah Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten/ Kota Kembar/ Bersaudara (Sister Province/ Sister City)			
36	Disesuaikan dengan karakteristik daerah (Asia Power Indeks - Military Capability)		Disesuaikan dengan karakteristik daerah (Asia Power Indeks - Military Capability)			
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,44 - 55,48	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,44 - 55,48		N/A
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	81,17 - 81,2	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	81,17 - 81,2	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	67,30
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71,04	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71,04	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	60,65
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,407	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,407	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,800
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,562	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,562	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	45,00
42	Kualitas Lingkungan Hidup		Kualitas Lingkungan Hidup			
	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	69,70
	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	10%	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	10%	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	68,00
	c. Pengelolaan Sampah		c. Pengelolaan Sampah			
	- Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	16%	- Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	16%	- Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	9,55

NO	RPJMN 2025-2029	2025	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	2025	RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2029	2025
	Indikator Utama Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan	
	- Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	62%	- Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	62%	- Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	33,91
43	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		Ketahanan Energi, Air, dan Pangan			
	a. Ketahanan Energi		a. Ketahanan Energi			
	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	850	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	850	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	530,00
	- Intensitas energi primer (SBM/ Rp milyar)	170,57	- Intensitas energi primer (SBM/ Rp milyar)	170,57		N/A
	b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	7,35	b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	7,35	b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	5,36
	c. Ketahanan Air		c. Ketahanan Air			
	Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)		Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)			
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	40,95	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	40,95	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	4,00
44	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	157,53	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	157,53	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	152,70
45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			
	a. Kumulatif	10,06%	a. Kumulatif	10,06%	a. Kumulatif	N/A
	b. Tahunan	19,04%	b. Tahunan	19,04%	b. Tahunan	20,00%

Sumber : Bapperida, data di olah

4.3. Inovasi

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Padang Lawas perlu dilaksanakan berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Padang Lawas, baik sifatnya jangka menengah sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD), maupun yang sifatnya tahunan seperti yang tercantum dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD). Guna meningkatkan kualitas hasil pembangunan, perlu didukung pula oleh inovasi pada perencanaan pembangunan, baik inovasi dalam tataran proses perencanaan, maupun dalam Program Pembangunan Daerah.

Pelaksanaan Inovasi pembangunan (inovasi pelayanan publik) Kabupaten Padang Lawas tahun 2025 adalah Sebagai berikut :

1. Optimalisasi percepatan pelaporan BMD dengan memanfaatkan aplikasi berbasis web.

Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) sendiri merupakan kegiatan penting didalam Pengelolaan Aset Daerah yang ada di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan Perbup No. 23 Tahun 2016 tentang Pengelolaan BMD Kabupaten Padang Lawas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Daerah (BMD) didefinisikan sebagai barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, BMD menjadi salah satu unsur penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga harus dikelola dengan akuntabel, efektif, efisien, serta ekonomis. Selain memberikan manfaat bagi masyarakat, penyediaan BMD dilakukan dalam rangka menunjang perekonomian daerah (misalnya penyediaan infrastruktur) sehingga dapat memberikan imbal balik kepada pemerintah daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD). Oleh sebab itu, Pemerintah daerah memerlukan strategi perencanaan yang baik serta tepat sasaran dalam pelaksanaannya sehingga aset daerah dapat menjadi salah satu sumber penggerak ekonomi dan PAD bagi Pemerintah Daerah.

2. Efektivitas Pembuatan Notulen Rapat Dengan Sistem Informasi Manajemen E-Risalah (Sim-Eri) Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas.

Dalam upaya memaksimalkan efektivitas pekerjaan Risalah atau notulen yang diterapkan selama ini membutuhkan waktu yang lama, baik dalam proses pengetikan dan koreksi pimpinan DPRD Sementara banyak rapat dan kegiatan yang mesti dilakukan alat kelengkapan dewan (AKD) sehingga dibutuhkan

cara yang lebih cepat dan memiliki kualitas baik dalam penyajiannya perlu penerapan teknologi dan informasi dalam penyajian risalah tersebut.

3. Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi dengan Pelaporan online untuk pemeliharaan jaringan irigasi Melalui aplikasi "LE OPJI".

Dengan pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) pada Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas diharapkan dapat meminimalisir waktu yang diperlukan dalam proses pelaporan dan pelaksanaan operasional/pemeliharaan jaringan irigasi di Kabupaten Padang Lawas sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai aturan yang berlaku.

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025 disusun sebagai penyesuaian atas visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dinamika pembangunan, perubahan asumsi dasar, perkembangan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta kondisi keuangan daerah yang terjadi selama tahun berjalan. Dokumen ini menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan yang lebih responsif, efektif, dan akuntabel. Penyusunan dokumen perubahan RKPD Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjaga keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam menentukan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025, sebagaimana amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan RKPD dilaksanakan dengan melakukan penyesuaian kebijakan dan target pembangunan daerah serta penyesuaian kerangka pendanaan berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Perubahan RKPD Tahun 2025 selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja (Renja) dan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing Perangkat Daerah, serta menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2025 sehingga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran tetap terjaga. Dengan ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2025, diharapkan pelaksanaan pembangunan di sisa tahun anggaran dapat lebih terarah dan tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan secara lebih optimal.

Akhirnya, Pemerintah Daerah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan Perubahan RKPD ini, serta mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus bersinergi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BUPATI PADANG LAWAS

PUTRA MAHKOTA ALAM HASIBUAN